



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmatnya buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 telah selesai disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan salah satu agenda besar reformasi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memenuhi tuntutan perubahan tatanan pemerintahan menuju ke arah kinerja Pemerintah Daerah yang semakin transparan dan akuntabel. Disamping itu melalui pelaporan kinerja ini, diharapkan akan memberi manfaat sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 pada hakekatnya merupakan mata rantai dan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kebumen 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016 serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 ini disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 telah disesuaikan dengan format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal yang menjadi pokok bahasan dari format penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 diukur dengan capaian substansif indikator kinerja sasarannya.

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja fungsi pelayanan, pemerintahan, dan pembangunan, dengan hati terbuka kami akan menerima setiap kritik dan saran yang membangun berkaitan dengan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta evaluasi. Dengan demikian diharapkan wujud pemerintahan yang baik akan semakin ditingkatkan di Kabupaten Kebumen.

Kebumen, Maret 2017

BUPATI KEBUMEN,



Ir. H. MOHAMMAD YAHYA FUAD, S.E.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	1
1.2 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
2.1 ASPEK PERENCANAAN.....	26
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
3.1 CAPAIAN KINERJA.....	32
3.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA.....	35
3.3 REALISASI ANGGARAN.....	75
BAB IV PENUTUP.....	101

BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1.1.1. Aspek Geografi.

1.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 128.111,50 Ha atau 1.281,115 Km². Secara astronomis Kabupaten Kebumen terletak pada 7°27'-7°50' Lintang Selatan dan 109°22'-109°50' Bujur Timur. Sedangkan secara topografi memiliki wilayah pantai dan juga pengunungan dengan ketinggian berkisar antara 0-997,5 meter di atas permukaan air laut. Sebagian besar wilayah terletak pada ketinggian di bawah 40 meter. Dari luas wilayah Kabupaten Kebumen pada tahun 2013 luas tanah sawah tercatat 39.748 Ha atau sekitar 31,03 % dan tanah kering seluas 88.363,50 Ha, atau sekitar 68,97%, yang terdiri dari tanah kering untuk pertanian seluas 42.799,50 Ha, dan tanah kering bukan untuk pertanian seluas 45.564 Ha.

Posisi Kabupaten Kebumen yang terletak pada bagian selatan Propinsi Jawa Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Banyumas, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Dengan luas laut 68.670,5 hektar dengan potensi budidaya 2.104,84 hektar, panjang pantai 57,5 kilometer yang terbentang sepanjang 8 kecamatan dari Kecamatan Mirit sampai dengan Ayah. Kabupaten Kebumen memiliki potensi perikanan dan kelautan yang selama ini terus diupayakan dapat dikembangkan menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

1.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah rawan bencana di Provinsi Jawa Tengah baik rawan longsor, rawan banjir, rawan kekeringan, rawan air bersih maupun rawan tsunami. Daerah rawan bencana tanah longsor terdiri dari 116 desa di 16 kecamatan, rawan bencana banjir 108 desa di 15 kecamatan, serta daerah rawan kekeringan atau rawan air bersih di 83 desa di 16 kecamatan. Sedangkan daerah yang

berpotensi tsunami ada di 52 desa di 12 kecamatan. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Kebumen

TANAH LONGSOR	BANJIR	KEKERINGAN	TSUNAMI
Rowokele	Adimulyo	Poncowarno	Ayah
Sempor	Kuwarasan	Padureso	Buayan
Ayah	Kebumen	Alian	Puring
Buayan	Bonorowo	Karangsambung	Petanahan
Karanggayam	Sruweng	Pejagoan	Klirong
Karanganyar	Padureso	Karanggayam	Buluspesantren
Pejagoan	Alian	Karanganyar	Ambal
Sruweng	Gombong	Sempor	Mirit
Karangsambung	Karanganyar	Buayan	Kuwarasan
Padureso	Karanggayam	Kutowinangun	Adimulyo
Alian	Buayan	Rowokele	Prembun
Gombong	Puring	Sruweng	Bonorowo
Poncowarno	Rowokele	Ayah	
Sadang	Ayah	Adimulyo	
Kebumen	Sempor	Prembun	
Adimulyo		Kebumen	
16 kecamatan	15 kecamatan	16 kecamatan	12 kecamatan

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2013

1.1.2. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1.1.2.1. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam Pasal 19 ayat (1) bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah, besarnya ditetapkan berdasarkan variabel a. Jumlah penduduk, b. Luas wilayah, dan c. Jumlah APBD, yang dalam pembentukannya Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mendasarkan pada Peraturan Pemerintah tersebut.

Berdasarkan penghitungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen berhak menggunakan pola maksimal yang disesuaikan dengan regulasi serta mempertimbangkan kondisi riil dan kebutuhan daerah. Adapun selengkapnya Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen hasil evaluasi kelembagaan tahun 2015 sebagai berikut :



- a. Sekretariat Daerah, terdiri dari :
Sekretaris Daerah di bantu oleh
 - 1) Asisten Pemerintahan :
 - a) Bagian Tata Pemerintahan
 - b) Bagian Hukum
 - c) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
 - 2) Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra
 - a) Bagian Administrasi Pembangunan
 - b) Bagian Perekonomian
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - 3) Asisten Administrasi
 - a) Bagian Organisasi
 - b) Bagian Umum
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum
 - 2) Dinas Kesehatan
 - 3) Dinas Pertanian dan Peternakan
 - 4) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
 - 5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - 6) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
 - 7) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - 8) Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 - 9) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
 - 10) Dinas Kelautan dan Perikanan
 - 11) Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral
 - 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 13) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 14) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- d. Badan Daerah, terdiri dari :
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 3) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
 - 4) Badan Kepegawaian Daerah
 - 5) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
- e. Kantor Daerah, terdiri dari :
 - 1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
 - 2) Kantor Ketahanan Pangan
 - 3) Kantor Lingkungan Hidup



- 4) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- f. Inspektorat
- g. Rumah Sakit Umum Daerah
- h. Satuan Polisi Pamong Praja
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- j. Kecamatan, terdiri dari :
 - 1) Kecamatan Ayah
 - 2) Kecamatan Pejagoan
 - 3) Kecamatan Rowokele
 - 4) Kecamatan Kebumen
 - 5) Kecamatan Buayan
 - 6) Kecamatan Karangsembung
 - 7) Kecamatan Sempor
 - 8) Kecamatan Sadang
 - 9) Kecamatan Gombong
 - 10) Kecamatan Alian
 - 11) Kecamatan Kuwarasan
 - 12) Kecamatan Poncowarno
 - 13) Kecamatan Puring
 - 14) Kecamatan Buluspesantren
 - 15) Kecamatan Adimulyo
 - 16) Kecamatan Kutowinangun
 - 17) Kecamatan Karanganyar
 - 18) Kecamatan Ambal
 - 19) Kecamatan Karanggayam
 - 20) Kecamatan Mirit
 - 21) Kecamatan Sruweng
 - 22) Kecamatan Bonorowo
 - 23) Kecamatan Petanahan
 - 24) Kecamatan Prembun
 - 25) Kecamatan Klirong
 - 26) Kecamatan Padureso
- k. Kelurahan, terdiri dari :
 - 1) Kelurahan Gombong
 - 2) Kelurahan Kebumen
 - 3) Kelurahan Wonokriyo

- 4) Kelurahan Tamanwinangun
- 5) Kelurahan Karanganyar
- 6) Kelurahan Selang
- 7) Kelurahan Panjatan
- 8) Kelurahan Panjer
- 9) Kelurahan Jatiluhur
- 10) Kelurahan Bumirejo
- 11) Kelurahan Plarangan

1.1.3. Sumber daya aparatur

Secara kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah di Kabupaten Kebumen dapat di lihat dari jumlah pegawai dengan di dasarkan pada tingkat golongan dan tingkat pendidikan pegawai.

Dari keseluruhan jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2016 berjumlah 13.319 pegawai dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan Non Guru

No.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI	
		2015	2016
1.	I	384	383
2.	II	2.327	2.108
3.	III	3.060	3.028
4.	IV	1,350	476
	Jumlah :	7,121	5,886

Sumber : BKD Kab. Kebumen

Tabel 1.3
Jumlah PNS menurut jabatan struktural

No.	ESELON	JUMLAH PEGAWAI	
		2015	2016
1.	II / a	1	1
2.	II / b	27	27
3.	III / a	67	62
4.	III/b	100	92
5.	IV/a	515	486
6.	IV/b	178	168
7.	V	63	56
	J u m l a h :	951	892

Sumber : BKD Kabupaten Kebumen

Tabel 1.4
Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan (Non Guru)

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	PERSENTASE
1.	S 2	357	6,07%
2.	S 1	1320	22,43%
3.	Diploma I	83	1,41%
4.	Diploma II	65	1,10%
5.	Diploma III	956	16,24%
6.	Diploma IV	78	1,33%
7.	S L T A	2353	39,98%
8.	S L T P	489	8,31%
9.	SD	185	3,14%
	Jumlah	5,886	100%

Sumber : BKD Kab. Kebumen

Tabel 1.5
Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan

No.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI	
		2015	2016
1.	I	385	283
2.	II	2,661	2,339
3.	III	6,071	6,170
4.	IV	4,717	4,527
	J u m l a h :	13,834	13.319

Sumber : BKD Kab. Kebumen

1.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan rencana kerja pemerintah daerah harus diawali dengan proses analisis yang mendalam terhadap persoalan-persoalan yang ada atau diperkirakan akan muncul dalam dinamika pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, perumusan masalah yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi sebuah hal yang tidak boleh tidak dilakukan, agar dokumen perencanaan yang dihasilkan senantiasa dapat menjaga korelasi yang positif antara visi, misi, serta kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang diharapkan.

1.2.1. Permasalahan Pokok

Beberapa indikator makro yang menjadi permasalahan pokok pembangunan di Kabupaten Kebumen antara lain :

- a. Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Daerah
- 1) Pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi yang melambat dan cenderung stagnan selama periode 2011-2014, dari 4,23% pada tahun 2011 menjadi 4,20% pada tahun 2014. Relatif lambat dan stagnannya pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi permasalahan besar dan tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
 - 2) Laju inflasi yang relatif tinggi
Angka inflasi Kota Kebumen selalu berada di atas inflasi regional, provinsi dan nasional. Sampai tahun 2014, Kabupaten Kebumen masih mengalami tingkat inflasi yang relatif tinggi. Pada tahun 2013 dan 2014, laju inflasi bahkan telah melampaui level yang direkomendasikan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian, perlu penanganan serius dari Pemerintah Daerah untuk mengupayakan stabilitas harga. Hal ini krusial dalam menjamin pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkelanjutan.
 - 3) Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)
Secara umum memang terjadi penurunan nilai tukar petani baik di level nasional, propinsi maupun kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa petani semakin menurun daya tawarnya terhadap pasar. Kondisi demikian patut menjadi perhatian utama, mengingat kontribusi sektor pertanian cukup dominan pada perekonomian di Kabupaten Kebumen.
 - 4) Realisasi investasi penanaman modal pada tahun 2014 mencapai Rp 216 milyar, mengalami kenaikan sebesar 36 milyar dari posisi tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan nilai PDRB Kabupaten Kebumen, rasionya baru berkisar 2,45%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah masih perlu bekerja keras dan bekerja cerdas dalam upayanya meningkatkan nilai investasi daerah yang akan mampu menggerakkan perekonomian secara signifikan.
- b. Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan
Masih tingginya jumlah penduduk miskin yang mencapai 19,87% pada tahun 2014 dan berada di atas rata-rata Jawa Tengah sebesar 13,58 % dan Nasional sebesar 10,96%;
- c. Belum Optimalnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas
- 1) Masih adanya kerusakan jalan kabupaten, dimana pada tahun 2014 mencapai 166,95 km atau 17,43% rusak berat;

- 2) Masih adanya kerusakan saluran irigasi dimana pada tahun 2014 baru 70% saluran irigasi dalam kondisi baik, sedangkan sisanya 30% dalam kondisi rusak;
- 3) Persentase penduduk berakses air minum baru mencapai 79,96%;
- d. Belum Optimalnya Aksesibilitas dan Pelayanan Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Keluarga Berencana
 - 1) Kurang optimalnya ketersediaan ruang kelas dibanding penduduk usia sekolah khususnya tingkat SLTA/ sederajat. Rasio ruang kelas dibanding penduduk usia sekolah SLTA pada tahun 2014 sebesar 1:44, sedangkan rasio idealnya 1:40;
 - 2) Ketersediaan tenaga kesehatan masih kurang. Jumlah Tenaga Kesehatan selama tahun 2011-2014 mengalami peningkatan, namun apabila dibandingkan terhadap jumlah penduduk masih kurang, dimana rasio pemenuhan tenaga Kesehatan adalah 1 : 2.500, sedangkan pada tahun 2014, rasio dokter per penduduk baru tercapai sebesar 1:7.835;
 - 3) Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/terlayani. Pada tahun 2014 cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB (*unmet need*) yang tidak terpenuhi/terlayani sebesar 13,41%.
- e. Belum Optimalnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik
 - 1) Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai indikator pelayanan publik dalam pelayanan publik, disebabkan keterbatasan sumber daya dan regulasi, termasuk dalam hal dukungan pembiayaan dalam pelaksanaannya;
 - 2) Permasalahan manajemen kepegawaian meliputi: komposisi PNS yang belum ideal untuk melakukan tugasnya agar lebih efektif, efisien dan profesional dalam melayani masyarakat, tingkat disiplin dan kinerja pegawai masih rendah.
- f. Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Bencana Alam
 - 1) Cakupan pelayanan persampahan (perkotaan) yang baru mencapai 43,37%;
 - 2) Tingginya potensi terjadinya bencana, dimana sebagian besar wilayah Kabupaten Kebumen merupakan kawasan rawan bencana.
- g. Masih Rendahnya Kemandirian Keuangan Daerah
 - 1) Ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat khususnya dana alokasi umum masih cukup besar. Proporsi rata-rata persentase dana alokasi umum terhadap total pendapatan selama tahun 2010-2015 rata-rata mencapai 69,82%;
 - 2) Sementara itu, kemampuan kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan masih cukup rendah. Rata-rata proporsi

PAD terhadap total pendapatan selama tahun 2011-2015 hanya berada pada kisaran 7,74%, meskipun angka tersebut meningkat dari 5,80% pada tahun 2011 menjadi 8,85% pada tahun 2015.

- 1.2.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2014 menghasilkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang perlu diidentifikasi secara lebih cermat. Selain itu, perlu diperhatikan beberapa hal yang harus mendapatkan fokus dan dikategorikan sebagai permasalahan/hambatan mendesak yang dihadapi dalam setiap urusan pembangunan daerah sebagai berikut:

1.2.2.1. URUSAN WAJIB

Urusan wajib terdiri dari :

a. Urusan Pendidikan

Permasalahan utama urusan ini antara lain:

- 1) Belum optimalnya aksesibilitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat terutama pada pendidikan dasar/menengah;
- 2) Masih adanya *drop out*/ putus sekolah untuk usia wajar dikdas dan pendidikan menengah;
- 3) Masih rendahnya kuota penerima bantuan bagi siswa miskin;
- 4) Belum optimalnya perhatian terhadap siswa berprestasi.

b. Urusan Kesehatan

Permasalahan utama urusan ini antara lain:

- 1) Masih cukup tingginya Angka Kematian Bayi;
- 2) Meningkatnya penyakit menular dan tidak menular antara lain Demam Berdarah Dengue (DBD), penyakit kusta (*leprae*), malaria, Tuberkulosis (TB) dan penyakit Cardiovasculer (Hipertensi), serta malnutrisi;
- 3) Masih rendahnya kualitas dan standar sarana pelayanan Kesehatan masyarakat;
- 4) Jumlah tenaga kesehatan masih kurang dan distribusinya belum merata, serta belum terstandarisasinya kompetensi tenaga kesehatan yang ada;
- 5) Belum seimbang sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan antara kuratif dengan promotif dan kuratif;
- 6) Masih rendahnya pemahaman PHBS di masyarakat;
- 7) Belum optimalnya aspek regulasi dan Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan;
- 8) Masih terdapatnya ancaman penyakit berbasis emerging *Deseases*, *New Emerging Deseases* dan *Re-Emerging Deseases*;
- 9) Belum adanya regulasi sistem rujukan pelayanan kesehatan;
- 10) Peran lintas sektor dalam bidang kesehatan belum optimal;
- 11) Masih rendahnya akses dan kualitas air minum dan sanitasi yang layak;

- 12) Masih rendahnya kualitas hygiene sanitasi makanan dan minuman;
 - 13) Masih tingginya penyakit berbasis lingkungan dikarenakan masih rendahnya kualitas sanitasi dasar;
 - 14) Belum optimalnya pengelolaan limbah medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) baik Pemerintah maupun Swasta;
 - 15) Masih rendahnya Fasilitas Sanitasi di Tempat-Tempat Umum (TTU), Industri dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM);
 - 16) Masih rendahnya fasilitas sanitasi dasar di lingkungan permukiman;
 - 17) Secara kuantitas SDM Sanitarian/Petugas Kesehatan Lingkungan masih kurang;
 - 18) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan;
 - 19) Belum optimalnya aspek regulasi dan sistem informasi kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan;
- c. Urusan Pekerjaan Umum
- Permasalahan utama urusan ini antara lain:
- 1) Tingkat kerusakan jalan kabupaten sebesar 17,43% rusak berat atau 166,95 km sebagai akibat penanganan jalan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sebagian besar jalan kabupaten sudah habis umur rencananya, kerusakan jalan sebelum waktunya, keterbatasan anggaran dan pemanfaatan jalan yang tidak sesuai antara lain menutup saluran drainase jalan;
 - 2) Belum optimalnya sistem jaringan jalan yang menjadi poros penghubung antar kecamatan dan antar pusat pertumbuhan terutama di wilayah utara;
 - 3) Masih rendahnya kondisi jalan kolektor di ruas jalan Jawa Tengah Selatan;
 - 4) Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang penanganan jalan dan jembatan;
 - 5) Kesenjangan akses energi/elektrifikasi di daerah pembangkit, masih adanya penduduk yang belum mendapatkan pelayanan listrik (rasio elektrifikasi rumah tangga baru mencapai 62,16%);
 - 6) Belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan setempat;
 - 7) Belum optimalnya investor swasta dalam pengembangan energi baru dan terbarukan;
 - 8) Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas jalan menuju sentraproduksi usaha masyarakat;
 - 9) Sebagian jalan berada pada daerah rawan bencana;
 - 10) Akses masyarakat terhadap sanitasi layak, masih rendah;
 - 11) Akses masyarakat terhadap air bersih dan air minum yang layak, masih belum terpenuhi secara optimal;

- 12) Minimnya sumber-sumber air baku yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan air minum Kabupaten Kebumen.
- d. Urusan Perumahan dan Permukiman
- Permasalahan utama urusan ini antara lain:
- 1) Masih belum optimalnya pemanfaatan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga mengakibatkan tidak tertatanya penempatan bangunan yang menyebabkan dilanggarnya ketentuan sempadan bangunan;
 - 2) Terbatasnya sarana dan prasarana, penunjang dalam penanganan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - 3) Masih terdapatnya rumah dan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan dan teknis bangunan;
 - 4) Masih terjadinya pembuangan air limbah dan sampah ke tempat/saluran badan air penerima sebagai buangan akhir yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, selain itu masih terdapat masyarakat perkotaan maupun perdesaan yang tidak memiliki sarana mandi, cuci dan kakus yang memadai sehingga mengakibatkan terhadap pencemaran air tanah;
 - 5) Terbatasnya sarana dan prasarana jalan lingkungan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan sehingga menghambat masyarakat dalam melakukan aktifitas;
 - 6) Belum optimalnya cakupan pelayanan air minum.
- e. Urusan Penataan Ruang
- Permasalahan utama urusan ini antara lain:
- 1) Belum memadainya pranata bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang;
 - 2) Masih rendahnya tingkat kesesuaian antara peruntukan dan pemanfaatan kawasan lindung.
- f. Urusan Perencanaan Pembangunan
- Permasalahan utama urusan ini antara lain:
- 1) Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan;
 - 2) Keterkaitan serta konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - 3) Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih rendah;
 - 4) Masih lemahnya tingkat koordinasi antar sektor, maupun antartingkatan pemerintahan.
- g. Urusan Perhubungan
- Permasalahan utama urusan ini antara lain:
- 1) Masih kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pengaman jalan, terminal, dan jembatan timbang;
 - 2) Belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda;

- 3) Masih rendahnya pelayanan angkutan massal dalam mengakomodir jumlah pergerakan orang, barang dan jasa;
 - 4) Belum optimalnya cakupan layanan infrastruktur telekomunikasi;
 - 5) Belum terpenuhinya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan ideal dalam mengimbangi penambahan kendaraan tiap tahunnya;
 - 6) Kesadaran masyarakat baik pengguna maupun penyedia jasa perlu ditingkatkan untuk menciptakan kondisi transportasi yang selamat, cepat, aman, nyaman, tertib dan teratur.
- h. Urusan Lingkungan Hidup
- Permasalahan utama urusan ini antara lain:
- 1) Jumlah timbulan sampah setiap tahunnya semakin meningkat yang disebabkan oleh:
 - a) Pertambahan jumlah penduduk;
 - b) Perubahan pola konsumsi masyarakat;
 - c) Pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor industri dan perdagangan;
 - d) Pertumbuhan rumah makan, toko oleh-oleh souvenir semakin meningkat;Sementara ketersediaan sarana dan prasarana tidak sebanding dengan peningkatan jumlah timbulan sampah (daya angkut 480 m³/hari) sehingga cakupan pelayanan cenderung menurun (dari 43,47% pada tahun 2011 menjadi 43,37% pada tahun 2014).
 - 2) Sistem pengelolaan TPA yang masih open dumping serta umur pakai TPA yang semakin pendek;
 - 3) Masih kurangnya sarana pengolahan air limbah komunal UKM, air limbah dari kawasan industri/perdagangan dan jasa serta air limbah domestik (rumah tangga, perkantoran, rumah makan, klinik/rumah sakit, hotel);
 - 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
 - 5) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam penyusunan dan implementasi dokumen lingkungan;
 - 6) Alih fungsi kawasan yang berfungsi lindung;
 - 7) Masih kurangnya penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan;
 - 8) Belum adanya laboratorium lingkungan yang terakreditasi;
 - 9) Pola pemanfaatan lahan untuk produksi biomassa telah menyebabkan kerusakan lahan dan/atau tanah;
 - 10) Semakin bertambahnya volume kendaraan bermotor yang mengakibatkan meningkatnya emisi gas buang dan penurunan kualitas udara ambient;
 - 11) Peningkatan emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - 12) Masih terbatasnya ruang terbuka hijau untuk taman;
 - 13) Belum optimalnya penataan tempat pemakaman umum serta masih terbatasnya lahan pemakaman;

- 14) Penataan dan pemeliharaan PJU belum optimal.
- i. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Permasalahan utama urusan ini antara lain:
 - 1) Belum optimalnya Layanan kependudukan On Line di tiap Kecamatan;
 - 2) Pembuatan Data Base Kependudukan untuk data dasar pembangunan;
 - 3) Penduduk migran belum terdokumentasi secara baik.
 - j. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Permasalahan utama urusan ini antara lain:
 - 1) Penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan belum optimal;
 - 2) Sarana dan prasarana perlindungan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan belum optimal;
 - 3) Tingginya permasalahan Trafficking dan Kekerasan terhadap anak dan perempuan;
 - 4) Pemahaman tentang pengarusutamaan gender belum optimal.
 - k. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Permasalahan utama urusan ini antara lain:
 - 1) Jumlah kelahiran dan pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi;
 - 2) Kualitas kesertaan ber-KB metode kontrasepsi jangka panjang;
 - 3) Tingkat partisipasi pria dalam ber-KB masih rendah;
 - 4) Jumlah *Drop Out* (DO) kesertaan ber-KB masih cukup tinggi;
 - 5) Tingkat kemandirian ber-KB masih rendah;
 - 6) Jumlah Unmetneed masih tinggi;
 - 7) Rata-rata kawin pertama wanita masih rendah;
 - 8) Peran institusi masyarakat belum optimal;
 - 9) Kualitas dan kuantitas bina keluarga belum optimal;
 - 10) Kualitas Data dan Informasi masih rendah.
 - l. Urusan Sosial
Permasalahan utama urusan ini antara lain:
 - 1) Tingginya jumlah penduduk miskin;
 - 2) Masih cukup tingginya angka penyandang masalah Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin;
 - 4) Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum optimal;
 - 5) Kurangnya kemandirian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra pemerintah dalam penanganan PMKS;
 - 6) Rendahnya aksesibilitas sarana dan prasarana bagi orang dengan disabilitas;
 - 7) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - 8) Belum optimalnya penanganan bencana alam dan dampak sosialnya.
 - m. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Permasalahan Urusan Ketenagakerjaan antara lain:

- 1) Masih cukup tingginya jumlah pengangguran terbuka;
- 2) Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- 3) Rendahnya penyerapan tenaga kerja;
- 4) Rendahnya kompetensi pencari kerja;
- 5) Upah Minimum Kabupaten (UKM) belum sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
- 6) Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja yang belum optimal;
- 7) Tingginya jumlah pekerja anak;
- 8) Masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan peraturan ketenagakerjaan.

Permasalahan Urusan Ketrasmigrasian antara lain:

- 1) Kesiapan tempat transmigran tidak tepat waktu yang dijadwalkan;
- 2) Belum efektifnya kegiatan penjajagan/survey kerjasama antardaerah (KSAD) ke lokasi-lokasi potensial, karena sering berubahnya kepastian target penempatan dari pemerintah pusat;
- 3) Belum tertibnya penataan aset/lahan transmigrasi lokal (*resettlement*).

n. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan utama urusan ini antara lain:

- 1) Masih rendahnya kemampuan pengelolaan usaha;
- 2) Masih terbatasnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta akses terhadap sumber pembiayaan dan informasi pasar;
- 3) Masih rendahnya daya saing produk.

o. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan utama urusan ini antara lain:

- 1) Masih rendahnya kualitas infrastruktur pendukung investasi;
- 2) Masih terbatasnya kepastian hukum dan jaminan usaha;
- 3) Iklim investasi yang kurang kondusif.

p. Urusan Kebudayaan dan Pariwisata

Permasalahan utama urusan ini antara lain:

- 1) Belum meratanya penataan Cagar Budaya;
- 2) Kurangnya pembinaan terhadap para seniman;
- 3) Kuangnya gedung pertunjukan dan Museum;
- 4) Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal;
- 5) Masih rendahnya promosi budaya lokal;
- 6) Masih lemahnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata;
- 7) Masih lemahnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata (ODTW);
- 8) Masih terbatasnya SDM profesional di bidang pariwisata;
- 9) Masih rendahnya tingkat kesadaran wisata masyarakat;
- 10) Belum optimalnya promosi pariwisata.

q. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan utama urusan ini antara lain:

- 1) Terbatasnya ketersediaan sarana olahraga;
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang mandiri dan kreatif;
- 3) Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda baik secara individu maupun kelembagaan;

- 4) Terbatasnya pembinaan atlet.
- r. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- Permasalahan utama urusan ini antara lain:
- 1) Pendidikan politik masyarakat masih rendah;
 - 2) Harmonisasi kehidupan beragama cenderung menurun;
 - 3) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - 4) Tingkat pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap berbagai peraturan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya masih rendah karena kurang intensifnya sosialisasi peraturan yang sudah ditetapkan;
 - 5) Relatif rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga masih terjadi pelanggaran terhadap norma/peraturan yang sudah ditetapkan;
 - 6) Semakin rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum di lingkungannya;
 - 7) Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, kapasitas pelayanan terhadap masyarakat jika dibandingkan baik ditinjau kualitas maupun kuantitas pada saat ini masih belum memadai;
 - 8) Berkurangnya kapasitas linmas dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengkoondisikan lingkungan yang kondusif.
- s. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
- Permasalahan utama urusan ini antara lain :
- 1) Belum optimalnya sinkronisasi implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
 - 2) Penegakan hukum dan peraturan daerah masih lemah;
 - 3) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*;
 - 4) Belum optimalnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
 - 5) Pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya asset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat;
 - 6) Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD serta mendukung terhadap peningkatan potensi PAD;
 - 7) Kurang optimalnya sumber pendapatan daerah dari BUMD;
 - 8) Pelayanan Publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat;

- 9) Belum adanya Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) yang jelas terkait prosedur mengenai mekanisme penyusunan anggaran;
 - 10) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja;
 - 11) Lemahnya budaya hukum masyarakat;
 - 12) Peningkatan DAU tidak signifikan bagi daerah;
 - 13) Daya serap DAK, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Rendah;
 - 14) Alokasi dana perimbangan yang diterima oleh desa semakin meningkat baik yang berasal dari ADD, DBH, Bankeu Provinsi;
 - 15) Belum sepenuhnya terdapat kesepahaman dalam penyelenggaraan Pelayanan Perijinan.
- t. Urusan Ketahanan Pangan
Permasalahan utama urusan ini antara lain:
- 1) Masih minimnya cadangan pangan dan lumbung pangan di daerah;
 - 2) Belum optimalnya distribusi dan keterjangkauan pangan oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - 3) Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan.
- u. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Permasalahan utama urusan ini antara lain:
- 1) Belum optimalnya sarana dan prasarana di pedesaan;
 - 2) Kurang optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas aparatur desa;
 - 3) Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha;
 - 4) Belum meratanya kemampuan organisasi kemasyarakatan dalam memahami tugas dan fungsinya;
 - 5) Belum optimalnya implementasi pengembangan lembaga ekonomi perdesaan;
 - 6) Masih kurangnya unsur transparansi dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;
 - 7) Masih terbatasnya kewenangan yang dimiliki aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- v. Urusan Komunikasi Dan Informatika
Permasalahan utama urusan ini antara lain:
- 1) Pemanfaatan teknologi informatika (e-gov) dalam penyelenggaraan pemerintah belum optimal;
 - 2) Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal.
- w. Urusan Pertanahan
Permasalahan utama urusan ini antara lain:
- 1) Banyak tanah yang belum bersertifikat;
 - 2) Penyelesaian tanah provinsi yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain.

- x. Urusan Statistik
Permasalahan utama urusan statistik adalah belum optimalnya penyediaan data/statistik daerah;
- y. Urusan Kearsipan
Permasalahan utama urusan ini antara lain:
 - 1) Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan;
 - 2) Kurang tertibnya pengelolaan kearsipan;
 - 3) Rendahnya sumber daya pengelola kearsipan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- z. Urusan Perpustakaan
Permasalahan utama urusan ini antara lain:
 - 1) Kurangnya tenaga pustakawan yang ahli di seluruh perpustakaan, baik perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan masyarakat lainnya;
 - 2) Kurangnya mobil unit layanan perpustakaan keliling (MULPK), sehingga tidak dapat melayani titik lokasi layanan yang diminta oleh masyarakat;
 - 3) Kurangnya media informasi dan sosialisasi tentang perpustakaan, yang menyebabkan masyarakat kurang mengenal akan keberadaan perpustakaan.

1.2.2.2. URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan terdiri dari :

- a. Urusan Pertanian
Permasalahan utama urusan ini antara lain:
 - 1) Masih rendahnya nilai tambah produk;
 - 2) Aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan terbatas;
 - 3) Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian;
 - 4) Tingginya alih fungsi lahan pertanian dan kerusakan lingkungan yang cenderung meningkat dan sulit untuk dikendalikan;
 - 5) Tingginya tingkat fluktuasi, baik terkait dengan biaya produksi dan harga komoditas hasil;
 - 6) Masih lemahnya dukungan infrastruktur terutama jaringan irigasi dan jalan usaha tani ke sentra produksi;
 - 7) Menekan kehilangan hasil pertanian (Losis);
 - 8) Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan peternak, baik dalam proses produksi maupun pasca produksi;
 - 9) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak menular.
- b. Urusan Perikanan dan Kelautan
Permasalahan utama urusan ini antara lain:
 - 1) Masih rendahnya aksesibilitas petani ikan dan nelayan terhadap sarana produksi, permodalan dan tata niaga hasil perikanan;
 - 2) Masih rendahnya kemampuan kelembagaan kelompok tani ikan dan nelayan;
 - 3) Terjadinya kerusakan lingkungan pada kawasan daerah aliran sungai dan pesisir;

- 4) Masih terbatasnya zona teritorial kegiatan usaha perikanan tangkap karena keterbatasan infrastruktur pendukung dan kapasitas armada penangkapan.
- c. Urusan Kehutanan
Permasalahan utama urusan ini antara lain:
 - 1) Masih tingginya tingkat gangguan keamanan hutan dan lahan;
 - 2) Masih terbatasnya upaya konservasi hutan dan lahan;
 - 3) Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di sekitar hutan;
 - 4) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan.
- d. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral
Permasalahan utama urusan ini antara lain:
 - 1) Beberapa perusahaan tidak meningkatkan ijin dari eksploitasi ke operasi produksi dan sebagian perusahaan tidak aktif karena terbatasnya kemampuan finansial, SDM dan teknologi dari perusahaan;
 - 2) Aturan hukum di daerah tentang pengelolaan sumber daya mineral belum ada.
- e. Urusan Perindustrian dan Perdagangan
Permasalahan utama urusan ini antara lain:
 - 1) Masih rendahnya kemampuan desain, pengendalian mutu, dan penganekaragaman produk, terutama di sektor industri kreatif;
 - 2) Belum optimalnya pengelolaan pasar daerah;
 - 3) Belum optimalnya pemanfaatan penguasaan teknologi;
 - 4) Pemanfaatan bahan baku lokal masih rendah;
 - 5) Kegiatan industri masih belum memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup;
 - 6) Masih belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

1.2.3. Identifikasi Isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja RPJMD Tahun 2010-2015 dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2014, yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, didapatkan berbagai permasalahan yang perlu diatasi oleh pemerintah daerah. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, perlu ditetapkan isu-isu strategis pembangunan daerah pada masa yang akan datang, dengan memperhatikan analisis lingkungan internal (isu pembangunan kabupaten) dan eksternal (isu pembangunan regional, provinsi dan nasional).

Tabel berikut menyajikan penjelasan atas hasil evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD Tahun 2010-2015 dan pelaksanaan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2014 yang kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan identifikasi isu strategis.

Tabel 1.6
Identifikasi Isu Strategis Berdasarkan Permasalahan Hasil Evaluasi
Kinerja RPJMD Tahun 2010-2015 dan Pelaksanaan RKPD Tahun 2014

NO	PERMASALAHAN	PENJELASAN	IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS
1	2	3	4
1	Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Daerah	Permasalahan ini ditandai dengan : masih rendahnya nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan; belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan; masih minimnya cadangan pangan dan lumbung pangan di daerah; masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan; masih rendahnya aksesibilitas petani ikan dan nelayan terhadap sarana produksi, permodalan dan tata niaga hasil perikanan; masih rendahnya kemampuan kelembagaan kelompok tani ikan dan nelayan; masih lemahnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata (ODTW); masih terbatasnya SDM profesional di bidang pariwisata	Ekonomi Berbasis Pertanian dan Industri, Perikanan dan Kelautan, Iklim Usaha dan Pariwisata
2.	Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan	Permasalahan ini ditandai dengan : masih tingginya angka kemiskinan; tingginya angka pengangguran; masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; tingginya angka PMKS; belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan dampak sosialnya; serta belum optimalnya perlindungan dan pengawasan tenaga kerja.	Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran, serta Permasalahan Sosial Lainnya

1	2	3	4
3	Belum Optimalnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Mitigasi Bencana	Permasalahan ini ditandai dengan : masih tingginya tingkat kerusakan jalan kabupaten; rendahnya cakupan pelayanan air minum perkotaan, air bersih perdesaan, dan pelayanan persampahan (perkotaan); tingginya potensi terjadinya kejadian bencana; masih terdapatnya rumah dan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan dan teknis bangunan; masih rendahnya Rasio elektrifikasi rumah tangga.	Infrastruktur, Perumahan Rakyat, Tata Ruang dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Penanggulangan Bencana
4	Belum Optimalnya Pelayanan Pendidikan, Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga, serta Pengembangan Budaya Daerah	Permasalahan ini ditandai dengan : masih adanya <i>drop out</i> / putus sekolah untuk usia wajar dikdas dan pendidikan menengah; rendahnya kuota penerima bantuan bagi siswa miskin; penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum merata; belum optimalnya perhatian terhadap siswa berprestasi; belum optimalnya pencapaian SPM Pendidikan; belum optimalnya pemberdayaan pemuda dan olahraga; dan rendahnya kualitas sarana prasarana olahraga; belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda baik secara individu maupun kelembagaan; masih terbatasnya pembinaan atlet; masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal; masih rendahnya promosi budaya lokal	Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga



1	2	3	4
5	Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan	Permasalahan ini ditandai dengan : masih kurangnya ketersediaan, distribusi, dan kompetensi tenaga kesehatan; belum optimalnya kualitas sarana pelayanan kesehatan masyarakat; masih tingginya Angka Kematian Bayi dan Ibu akibat melahirkan; adanya peningkatan penyakit menular, penyakit tidak menular, dan malnutrisi; masih rendahnya pemahaman PHBS di masyarakat; belum seimbang sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan antara kuratif dengan promotif dan kuratif.	Kesehatan
6	Belum Optimalnya Kinerja dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik	Permasalahan ini ditandai dengan: pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat; belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan masih adanya permasalahan manajemen kepegawaian baik dari segi komposisi, kapasitas dan kapabilitas, profesionalisme, kinerja, maupun kedisiplinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
7	Semakin Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	Permasalahan ini ditandai dengan: masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; jumlah timbulan sampah setiap tahunnya semakin meningkat; masih terbatasnya ruang terbuka hijau untuk taman	Lingkungan Hidup

1	2	3	4
8	Semakin Menurunnya Upaya Pengendalian Kependudukan dan Upaya Pembangunan Keluarga Sejahtera	Permasalahan ini ditandai dengan : Masih tingginya angka Total Fertility Rate (TFR); masih rendahnya cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi; masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB yang tidak terpenuhi/ terlayani; masih rendahnya kesertaan ber-KB; kurangnya tenaga Penyuluh KB; masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program keluarga sejahtera	Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, KB dan Ketahanan Keluarga

Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah telah menghasilkan 8 (delapan) isu strategis. Langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas penanganan terhadap ke-8 isu strategis tersebut, yang dilakukan dengan menyusun sejumlah kriteria atau indikator yang akan digunakan dalam penilaian atau pembobotan terhadap isu-isu strategis. Kriteria dan pembobotan untuk penentuan prioritas penanganan isu strategis pembangunan Tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.7
Kriteria dan Pembobotan Penentuan Prioritas Penanganan
Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2016

NO.	KRITERIA	BOBOT/NILAI
1.	Berpengaruh besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah (RPJMD dan RPJPD) dan nasional	25
2.	Berdaya ungkit besar dalam pembangunan daerah (khususnya penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat)	25
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Menjadi kewenangan (tugas dan tanggung jawab) Pemerintah Daerah	20
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani/ketersediaan sumberdaya	10

Dengan menggunakan kriteria pada tabel di atas, kemudian dilakukan skoring untuk setiap isu strategis yang telah diidentifikasi. Skoring dilakukan dengan memberikan nilai antara 1 sampai dengan 5. Isu yang memiliki kesesuaian paling tinggi dengan kriteria mendapatkan nilai 5, sedangkan isu yang kesesuaiannya paling rendah mendapatkan nilai 1. Hasil skoring kemudian dikalikan dengan besaran bobot setiap kriteria, sehingga menghasilkan urutan prioritas isu strategis.

Berdasarkan skoring dan pembobotan, didapat urutan isu strategis pembangunan daerah tahun 2016 sebagai berikut :

1. Ekonomi Berbasis Pertanian dan Industri, Perikanan dan Kelautan, Iklim Usaha dan Pariwisata;
2. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran, serta Permasalahan Sosial Lainnya;
3. Infrastruktur, Perumahan Rakyat, Tata Ruang dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Penanggulangan Bencana;
4. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga;
5. Kesehatan;
6. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;
7. Lingkungan Hidup; dan
8. Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, KB dan Ketahanan Keluarga.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. ASPEK PERENCANAAN

2.1.1. Pernyataan Visi

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, sebagai landasan dan pedoman bagi seluruh SKPD Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahun yang pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Visi Kabupaten Kebumen merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung pada 9 Desember 2015, adapun visi Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

Untuk memperjelas sasaran yang hendak diwujudkan, maka diberikan pengertian terhadap variabel yang terdapat dalam visi di atas sebagai batasan operasionalnya, yaitu:

- Bersama** : adalah bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama – sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.
- Menuju** : adalah bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur.
- Sejahtera** : adalah bahwa pembangunan harus berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar, masyarakat berupa pangan, sandang, papan, (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Unggul** : adalah bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi.
- Berdaya** : adalah bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus

- mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi.
- Agamis : adalah bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniah, yang dicirikan dengan sifat- sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan , kebenaran, dan persaudaraan.
- Berkelanjutan : adalah bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Semua kondisi ideal yang hendak dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun ini, diwujudkan dengan berbasis agrobisnis, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025.

2.1.2. Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi di atas maka diperlukan penjabaran dari visi tersebut, agar dapat diterapkan selama lima tahun ke depan dalam misi-misi. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menetapkan sebanyak 6 (enam) misi sebagai berikut :

- Misi Pertama : Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Misi Kedua : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial msyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rokhaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan, sinergitas antar elemen masyarakat.
- Misi Ketiga : Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal untggulan

melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan.

- Misi Keempat : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.
- Misi Kelima : Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Misi Keenam : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

2.1.3. Tujuan, Sasaran dan Stratejik (Cara mencapai Tujuan dan Sasaran)

Bahwa dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kebumen sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016-2021 yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menjabarkan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa agenda utama dan strategi pembangunan kurun waktu 2016-2021 yang merupakan tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut telah dirumuskan Tujuan dan Sasaran beserta kebijakan umum dan program pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen 2016-2021 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Bupati Kebumen Tahun 2016.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Menurut prosedur yang ideal, Rencana Kinerja Tahunan disusun setiap awal tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan. Target dari indikator kinerja Sasaran ini ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing indikator. Satuan target ditetapkan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat capaian kinerja/keberhasilan masing-masing Sasaran.

Perjanjian Kinerja tahun 2016 telah ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2016 yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya, sebagaimana tersebut di bawah ini.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	12,38 tahun
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	6,98 tahun
2.	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	54,74 %
3.	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	44,23 %
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	72,81 tahun
		6. Angka Kematian Ibu	100
		7. Angka Kematian Bayi	11,00

1	2	3	4
5.	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus	100%

		Sekolah	
		9. Cakupan Penanganan KasusKasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	25,04 %
6.	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran hukum	10. Penurunan kasus pelanggaran hukum	800 kasus
7.	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbuhan ekonomi	5,86 %
		12. Pendapatan perkapita penduduk	Rp. 18.349.630
		13. Rasio/Indeks Gini	0,23
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	1 Unit
8.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	0 %
9.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	16,80 %
10.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	52,68 %
11.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,00
12.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	19,26 %
13.	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	2,07 %
14.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	77,40 %

1	2	3	4
---	---	---	---



15.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	95,00 %
16.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	nilai Sangat Tinggi >3
		24. Nilai akuntabilitas kinerja	B
		25. Opini BPK atas LKPD	WTP
17.	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	40,00 %



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Pencapaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2016

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	12,38 tahun	12,49 tahun	100,86%
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	6,98 tahun	7,04 tahun	100,86%
2.	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	54,74 %	56,13%	102,54%
3.	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	44,23 %	46,88%	105,98%



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	72,81 tahun	72,81 tahun	100%
		6. Angka Kematian Ibu	100	80,01	119,99%
		7. Angka Kematian Bayi	11,00	8,95	118,64%
5.	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	100%	100%	100%
		9. Cakupan Penanganan KasusKasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	25,04 %	6,1%	24,34%
6.	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran hukum	10. Penurunan kasus pelanggaran hukum	800 kasus	800 kasus	100%
7.	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbuhan ekonomi	5,86 %	6,29%	107,34%
		12. Pendapatan perkapita penduduk	Rp. 18.349.630	Rp. 17.367.400	94,64%
		13. Rasio/Indeks Gini	0,23	0,241	95,22%
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	1 Unit	5 Kawasan	500%
8.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	0 %	20,26%	125,42%
9.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	16,80 %	27,97%	166,48%
10.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	52,68 %	74,54 %	141,49%
No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2016		CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	



1	STRATEGIS 2	KINERJA 3	4	I 5	6
11.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,00	61,56 %	97,71%
12.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	19,26 %	Proses penghitungan BPS Jateng	-
13.	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	2,07 %	22,43 %	108,33 %
14.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	77,40 %	72,24%	99,80%
15.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	95,00 %	92,33%	97,18%
16.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	nilai Sangat Tinggi >3	nilai Sangat Tinggi >3	100%
		24. Nilai akuntabilitas kinerja	B	CC	90,58%
		25. Opini BPK atas LKPD	WTP	Dalam proses audit	-
17.	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	40,00 %	44,81%	112,03%

Dari 26 indikator sasaran yang telah ditetapkan di atas terdapat :



- a. 2 (dua) indikator sasaran yang masih dalam proses penghitungan dan audit yaitu :
 - 1) Angka Kemiskinan
 - 2) Opini BPK atas LKPD
- b. 6 (enam) indikator sasaran belum mencapai target
- c. 4 (empat) indikator sasaran sesuai dengan target
- d. 14 (empat belas) indikator sasaran yang melampaui target,

3.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap raihan indikator kinerja sasaran untuk mengetahui realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2016 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun 2016 tercermin dari capaian kinerja beberapa sasaran strategis sebagai berikut :

Indikator kinerja dan sasaran sesuai dengan permintaan dan Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Ada 6 (enam) Indikator sasaran bidang pendidikan yang ada yaitu Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Persentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan, Angka Melek Huruf Al-Quran Siswa Lulus Sekolah dan Persentase Gedung Sekolah dalam kondisi baik.



3.2.1. Misi pertama yaitu Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

3.2.1.1. Sasaran pertama adalah meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dengan 2 (dua) indikator sasaran sebagai berikut :

3.2.1.1.1. Angka Harapan Lama Sekolah

Pada sasaran ini pencapaian nilai sasaran sudah melebihi target yang ditentukan dengan pencapaian lebih dari 100%, dengan kondisi target Angka Harapan lama sekolah tahun 2016 adalah 12,38 tahun dan realisasi capaian 12,49 tahun.

3.2.1.1.2. Rata-rata lama sekolah.

untuk Angka Rata-rata Lama sekolah juga mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 7,04 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 6,98 tahun. Dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 ada peningkatan dari nilai Rata-rata Lama Sekolah tahun 2015 sebesar 6,93 tahun dan Angka Harapan Lama sekolah tahun 2015 sebesar 12,21 tahun.

Hal ini menandakan keberhasilan dengan adanya peningkatan pada indikator Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah yang merupakan bagian dari komponen perhitungan Indeks Prestasi Manusia (IPM). Sebagai catatan, untuk Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah adalah sebagian dari Indikator perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari perhitungan Badan Pusat Statistik, dimana untuk angka yang dipublikasikan adalah angka tahun N+1, sehingga untuk perhitungan tahun 2016 baru akan dipublikasikan pada tahun 2017 sekitar bulan Juli sampai dengan Agustus. Angka capaian 2016 adalah angka asumsi awal capaian sebelum dipublikasikan pada sekitar bulan Agustus oleh BPS Pusat.

Tabel 3.2

Derajat Pendidikan Masyarakat

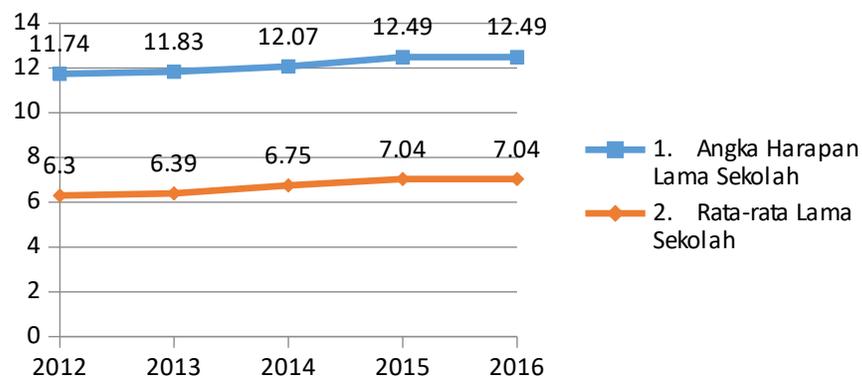
INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2016-2021	REALISA SI KINERJA TH 2012	REALISA SI KINERJA TH 2013	REALISA SI KINERJA TH 2014	REALISA SI KINERJA TH 2015	REALISA SI KINERJA TH 2016
1. Angka Harapan Lama Sekolah	13,20	11,74	11,83	12,07	12,49	12.49



2. Rata-rata Lama Sekolah	7,20	6,30	6,39	6,75	7,04	7.04
---------------------------	------	------	------	------	------	------

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen

Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan setiap tahun, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada indikator-indikator tersebut berhasil memenuhi harapan yang telah ditargetkan baik pada Renstra Tahun 2010-2015 Dinas Dikpora Kab.Kebumen dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015. Berikut ini adalah gambar grafik realisasi capaian indikator-indikator tersebut.



Grafik 3.1.

Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Keberhasilan peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah adalah dengan adanya dukungan anggaran program dan kegiatan pada pendidikan Formal maupun Nonformal dimana akses pendidikan untuk meningkatkan tingkat pendidikan akhir penduduk per usia 15 tahun sampai dengan 55 tahun tersedia pada bidang pendidikan menengah dan kegiatan belajar Paket A, Paket B dan Paket C, selain program kegiatan tersebut adanya program Beasiswa keluarga tidak mampu yang bersumber dari APBN yaitu Program Indonesia Pintar dan program Beasiswa Keluarga Miskin yang bersumber dari APBD untuk siswa kurang mampu kelas 6 dan kelas 9 untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Kabupaten Kebumen merupakan stimulan aktif yang mendorong angka bertahan sekolah dan meningkatkan layanan pendidikan pada masyarakat luas. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah layanan pendidikan NonFormal, karena diperlukan koordinasi lebih lanjut lintas sektor di tingkat Kabupaten terhadap target peningkatan Indeks Pembangunan Manusia terutama untuk penduduk

usia 15-55 tahun yang masih banyak tingkat kelulusan pendidikannya baru di tingkat SMP, SMA/SMK bahkan sebagian baru lulus jenjang SD.

- 3.2.1.2. Sasaran kedua yaitu meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan tercapai memenuhi target dengan target indikator sasaran persentase akses dan mutu pelayanan pendidikan sebesar 54,74% dan realisasi indikator capaiannya sebesar 56,13% dengan nilai prosentase capaian sebesar 102,54%, dengan kedalaman perhitungan untuk indikator sasaran persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan adalah dengan rumus $((\text{PERSENTASE APS (Angka Partisipasi Sekolah)} + \text{Persentase Sekolah Terakreditasi A})/2)$, capaian untuk APS adalah 92,23% dan sekolah terakreditasi A sebesar 20,03%. Untuk catatan bahwa rata-rata persentase akses dan mutu pelayanan pendidikan pada tahun 2015 tercapai 54,73% meningkat ditahun 2016 dengan capaian 56,13% dengan peningkatan capaian juga pada tiap komponen penghitung rumus.

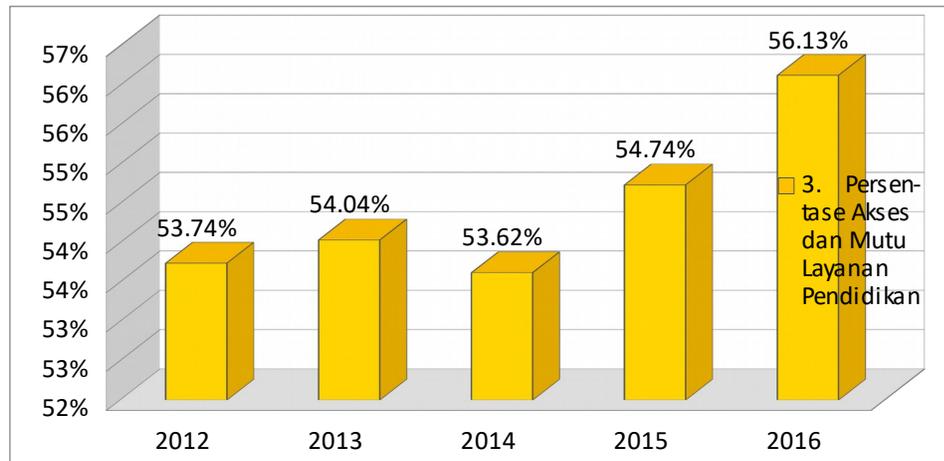
Tabel 3.3

Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan

INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2016-2021	REALISA SI KINERJA TH 2012	REALISA SI KINERJA TH 2013	REALISA SI KINERJA TH 2014	REALISA SI KINERJA TH 2015	REALISA SI KINERJA TH 2016
1. Persentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan	63,39%	53.74%	54.04%	53,62%	54,74%	56,13%

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen

Persentase akses dan mutu pelayanan pendidikan menilai akses dan mutu layanan pendidikan dengan perhitungan peningkatan jumlah sekolah yang ter-akreditasi A dan nilai persentase Angka Partisipasi Sekolah dibagi 2 (dua), Berikut ini adalah gambar grafik realisasi capaian indikator tersebut.



Grafik 3.2.

Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Rumus Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah $\{(Jumlah\ penduduk\ berumur\ rentang\ usia\ tertentu\ yang\ masih\ sekolah : (dibagi)\ Jumlah\ penduduk\ umur\ rentang\ usia\ tertentu) \times 100\}$. Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah berdasarkan standar Nasional. Persentase capaian Akses dan Mutu Layanan Pendidikan cenderung meningkat sampai dengan tahun 2016, hanya pada tahun 2014 terjadi penurunan capaian dari 54,04% di tahun 2013 menjadi 53,62% pada tahun 2014. Hal ini dikarenakan adanya penambahan sekolah/madrasah baru yang belum dapat dijadwalkan pelaksanaan penilaian akreditasi karena belum memenuhi persyaratan minimum 2 tahun pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar, dan hal lain dimana angka partisipasi sekolah cenderung berkurang di tahun 2014, karena cukup banyak peserta didik dibawah 6 tahun yang sudah masuk sekolah/madrasah jenjang Sekolah Dasar sederajat dimana sesuai ketentuan penerimaan peserta didik baru jenjang sekolah dasar minimal berusia 7 tahun. Solusi yang sudah dilaksanakan adalah dengan Surat Edaran Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama

dan Sekolah Menengah Atas yang membatasi Usia masuk sekolah pertama di Sekolah Dasar dengan minimal usia masuk pada saat pendaftaran 6.5 tahun.

- 3.2.1.3. Sasaran ketiga meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olah raga dengan indikator capaian prestasi pemuda dan olah raga dengan target 44,23% dan realisasi sebesar 46,88% dengan keterangan perhitungan angka cabang olahraga yang berprestasi pada kejuaraan sebanyak 15 cabang olahraga dari total 32 cabang/klub olahraga yang terdaftar di KONI Kabupaten Kebumen. Prosentase tingkat keberhasilan capaian kinerja sebesar 105,98%.

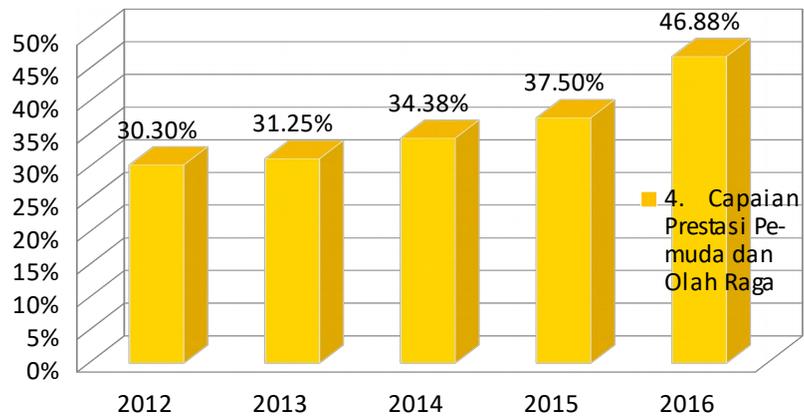
Tabel 3.4

Prestasi dan pembinaan pemuda dan olah raga

INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2016-2021	REALISA SI KINERJA TH 2012	REALISA SI KINERJA TH 2013	REALISA SI KINERJA TH 2014	REALISA SI KINERJA TH 2015	REALISA SI KINERJA TH 2016
1. Capaian Prestasi Pemuda dan Olah Raga	65,38%	30,30%	31,25%	34,38%	37,50%	46,88%

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen

Meningkatnya capaian prestasi pemuda dan olahraga dapat digambarkan dengan banyaknya cabang olahraga/ klub olahraga yang memiliki atlet yang berprestasi pada tingkat provinsi dan nasional, capaian indikator ini dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 selalu meningkat prosentasenya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada indikator tersebut berhasil memenuhi target sesuai pada indikator Renstra Tahun 2010-2015 Dinas Dikpora Kab.Kebumen dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015. Berikut ini adalah gambar grafik peningkatan realisasi capaian indikator tersebut.



Grafik 3.3

Capaian Prestasi Pemuda dan Olah Raga Tahun 2012 -2016

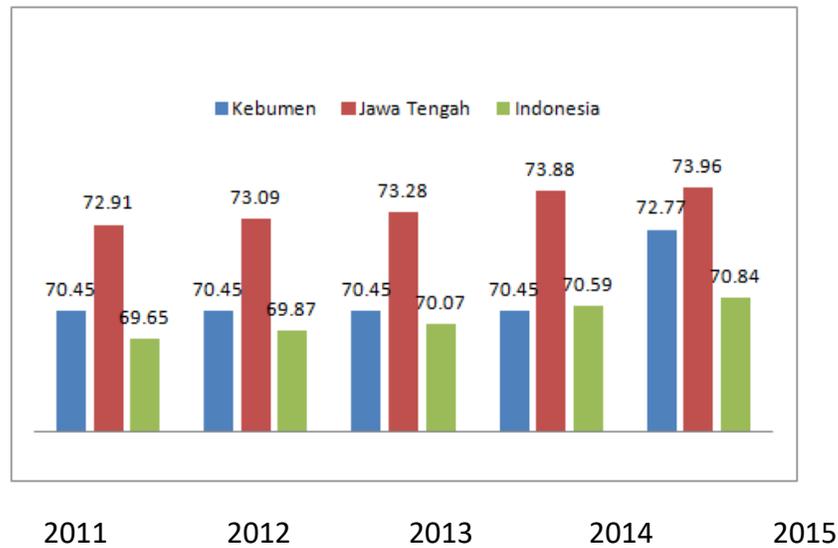
Keberhasilan peningkatan capaian prestasi pemuda dan olahraga Kabupaten Kebumen tidak lepas dari dukungan anggaran APBD untuk program pemuda dan olahraga, sarana prasarana olahraga dan keikutsertaan atlet-atlet yang berprestasi ditingkat Kabupaten untuk mengikuti event kejuaraan di tingkat provinsi maupun nasional. Hal yang masih perlu diperhatikan pada program Pemuda dan Olah Raga adalah peningkatan Kompetensi Pelatih (bersertifikat) dan Pencari Bakat (Scout) pada cabang-cabang olah raga tertentu yang potensial, serta wasit lomba yang sudah berlisensi (bersertifikat) minimal setingkat nasional. Sehingga penguatan dasar pelatihan pemuda dan Atlet-atlet yang potensial/berbakat dapat lebih siap dan terlatih untuk maju pada event kejuaraan pada tingkat yang lebih tinggi, bahkan sampai dengan tingkat Internasional.

3.2.1.4. Sasaran keempat yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, didukung oleh 3 (tiga) indikator sasaran yaitu :

3.2.1.4.1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2012 hingga 2016, Kabupaten Kebumen telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup sebesar 2,56 tahun. Pada tahun 2012 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kebumen 70,45 tahun dan pada tahun 2016 Angka Harap Hidup 72,81 tahun.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Kebumen periode 2011-2015 lebih rendah dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah periode 2011-2015, namun lebih tinggi dari Angka Harapan Hidup Indonesia periode 2011-2015. Dapat dilihat pada gambar berikut:



Gafik 3.4

Perbandingan Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup tahun 2016 ditargetkan 72,81 tahun, terealisasi 72,81 tahun atau pencapaian target sebesar 100 %. Meskipun secara umum Angka harapan hidup sangat berhasil namun indikator ini sangat dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya yaitu Angka Kecukupan Gizi, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi yang kinerjanya perlu terus ditingkatkan.

Berikut adalah realisasi Angka Harapan Hidup Kabupaten Kebumen tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 3.5

Angka Harapan Hidup

INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2016-2021	REALISA SI KINERJA TH 2012	REALISA SI KINERJA TH 2013	REALISA SI KINERJA TH 2014	REALISA SI KINERJA TH 2015	REALISA SI KINERJA TH 2016
1. Angka Harapan Hidup	73,01	70,45	70,45	70,45	71,02	72,81

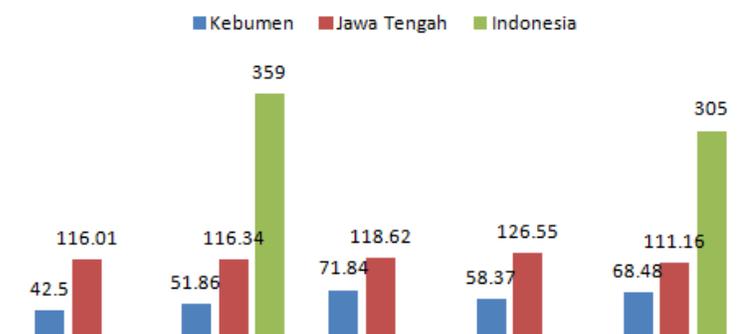
Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

3.2.1.4.2. Angka Kematian Ibu

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, di antaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh

kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selama periode 2012 hingga 2016 Kabupaten Kebumen ada kenaikan dan penurunan Angka Kematian Ibu. Pada tahun 2016 Kabupaten Kebumen Angka Kematian Ibu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2015 karena adanya penyakit yang diderita ibu sebelum hamil misalnya jantung, diabetes militus dan hipertensi. Namun demikian Angka Kematian Ibu tahun 2016 melampaui capai kinerja yang diharapkan, target Angka Kematian Ibu tahun 2016 sebesar 100/ 100.000 KH , terealisasi 80,01/100.000 KH atau pencapaian target sebesar 119,99 %.

Angka Kematian Ibu Kabupaten Kebumen periode 2011-2015 lebih rendah dibandingkan dengan Angka Kematian Ibu Provinsi Jawa Tengah periode 2011-2015 dan lebih rendah dibandingkan dengan Angka Kematian Bayi Indonesia pada tahun 2012 dan 2015. Dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.5

Perbandingan Angka Kematian Ibu

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menurunkan AKI melalui :

- AMP (*Audit Maternal Perinatal*);
- Pembentukan kelas Ibu hamil;
- Jejaring PONED (*Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar*) dan PONEK (*Pelayanan obstetric dan neonatal emergensi komprehensif*);
- Pemenuhan Sarpras PONEK;
- ANC (*antenatal care*) berkualitas, ANC terpadu.

Berikut adalah realisasi Angka Kematian Ibu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 3.6
Angka Kematian Ibu

INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2016-2021	REALISA SI KINERJA TH 2012	REALISA SI KINERJA TH 2013	REALISA SI KINERJA TH 2014	REALISA SI KINERJA TH 2015	REALISA SI KINERJA TH 2016
1. Angka Kematian Ibu	90/ 100.000 KH	51,86// 100.000 KH	71,84/ 100.000 KH	58,37/ 100.000 KH	68,48/ 100.000 KH	80,01/ 100.000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

3.2.1.4.3. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian maupun program kesehatan ibu dan anak sebab angka kematian bayi ini berkaitan erat dengan tingkat kesehatan ibu dan anak. Selama periode 2012 hingga 2016 di Kabupaten Kebumen ada kenaikan dan penurunan Angka Kematian Bayi, namun demikian pada tahun 2016 Kabupaten Kebumen berhasil menurunkan Angka Kematian Bayi apabila dibandingkan dengan tahun 2015. Angka Kematian Bayi tahun 2016 ditargetkan 11/1000 KH, terealisasi 8,95/1000 KH atau pencapaian target sebesar 118,63 %.

Angka Kematian Bayi Kabupaten Kebumen periode 2011-2015 lebih rendah dibandingkan dengan Angka Kematian Bayi Provinsi Jawa Tengah periode 2011-2015 dan lebih rendah dibandingkan dengan Angka Kematian Bayi Indonesia pada tahun 2012 dan 2015. Dapat dilihat pada gambar berikut:



Grafik 3.6

Perbandingan Angka Kematian Bayi

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menekan Angka Kematian Bayi diantaranya dengan :

- a. Pencegahan anemi pada ibu hamil dengan pemberian tablet tambah darah 90 tab;
- b. Pemberian PMT bagi ibu hamil KEK;
- c. Peningkatan kapasitas penanganan BBLR dan Asfeksia;
- d. Penanganan kasus rujukan yang optimal;
- e. Sarana prasarana PICU (Pediatri Intensive Care Unit) dan NICU (Neonatal Intensive Care Unit) di Rumah Sakit yang memadai;
- f. Perlu Sarana prasarana Puskesmas PONEC (Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar) yang memadai;

Berikut adalah realisasi Angka Kematian Bayi tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 3.7
Angka Kematian Bayi

INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2016-2021	REALISA SI KINERJA TH 2012	REALISA SI KINERJA TH 2013	REALISA SI KINERJA TH 2014	REALISA SI KINERJA TH 2015	REALISA SI KINERJA TH 2016
1. Angka Kematian Bayi	10,75/ 1000 KH	10,51/ 1000 KH	9,53/ 1000 KH	10,12/ 1000 KH	10,50/ 1000 KH	8,95/ 1000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

3.2.2. Misi kedua yaitu Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, social, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pembangunan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas anyar elemen masyarakat.

3.2.2.1. Sasaran pertama yaitu Terwujudnya Masyarakat yang agamis dan berahlak mulia dengan indikator sasaran :

3.2.2.1.1. Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah

dengan capaian 100% dimana total Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah sebanyak 99,997% dengan jumlah siswa peserta ujian total jenjang SD sederajat sampai dengan SMA/SMK sederajat sebanyak 59,257 siswa lulus ujian dari total jumlah peserta ujian sebanyak 59,259 siswa, dimana ada 2 siswa yang tidak lulus ujian di jenjang SMA/SMK dikarenakan ketidak ikutsertaan siswa pada proses ujian sementara data sudah masuk menjadi peserta Ujian Nasional. Rincian jumlah peserta didik lulus sekolah per jenjang sekolah adalah :

- a. Jenjang SD/MI jumlah total peserta Ujian Sekolah Berstandar Nasional sejumlah 21.639 peserta Ujian Sekolah dengan jumlah peserta lulus sebanyak 21.639 peserta, dengan persentase capaian 100%.
- b. Jenjang SMP/MTs jumlah total peserta Ujian Nasional sejumlah 21.248 peserta Ujian Sekolah dengan jumlah peserta lulus sebanyak 21.248 peserta Ujian Nasional jenjang SMP/MTs, dengan persentase capaian 100%.
- c. Jenjang SMA/MA/SMK jumlah total peserta Ujian Nasional sejumlah 16.372 dengan jumlah peserta lulus sebanyak 16.370 peserta ujian Nasional jenjang SMA/MA/SMK , dengan persentase sebanyak 99,99%.

Tabel 3.8

Masyarakat yang agamis dan berahlak mulia

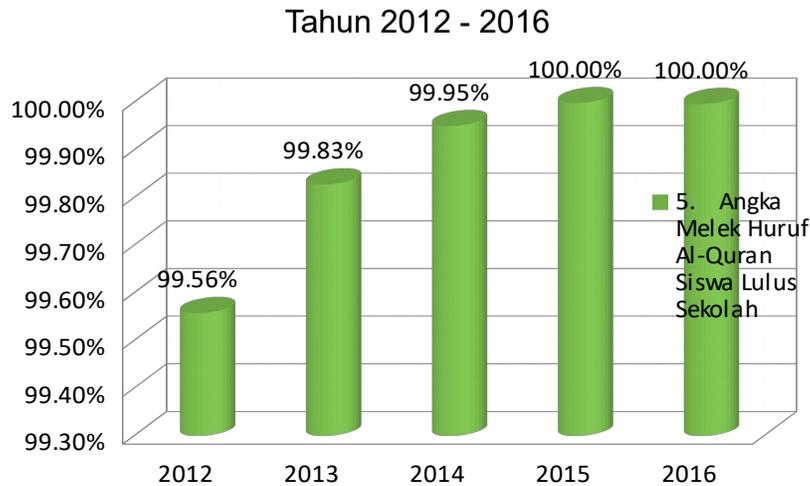
INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2016-2021	REALISA SI KINERJA TH 2012	REALISA SI KINERJA TH 2013	REALISA SI KINERJA TH 2014	REALISA SI KINERJA TH 2015	REALISA SI KINERJA TH 2016
1. Angka Melek Huruf Al-Quran Siswa Lulus Sekolah	100%	99,56%	99,83%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen

Angka Melek Huruf Al-Quran secara umum meningkat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Berikut ini adalah gambar grafik peningkatan realisasi capaian indikator Angka Melek Huruf Al-Quran.

Grafik 3.7

Angka Melek Huruf Al-Quran Siswa Lulus Sekolah



Salah satu penilaian pada proses kelulusan untuk siswa/peserta didik yang beragama Islam adalah dapat membaca Al-Quran pada ujian sekolah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa peserta yang beragama Islam pada Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang berhasil lulus juga sudah lulus tes membaca Al-Quran. Capaian angka Melek Huruf Al-Quran siswa lulus sekolah semakin meningkat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, menandakan bahwa pelaksanaan kegiatan Ujian Sekolah untuk Sekolah/Madrasah jenjang SD sederajat dan Ujian Nasional untuk Sekolah/Madrasah jenjang SMP-SMA/SMK sederajat berjalan dengan baik

3.2.2.1.2. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan

Target penurunan Penanganan Kasus Pelanggaran Norma-Norma Agama sebesar 25,04% dinilai dari tiga indikator:

a. Penurunan Jumlah Penderita HIV AIDS

Kegiatan ini diampu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Jumlah penderita HIV AIDS tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 66,35% dari jumlah tahun 2015 sebesar 107 kasus, pada tahun 2016 menjadi 178 kasus.

Tahun	HIV	AIDS	Jumlah
2015	47	60	107
2016	62	116	178

b. Penurunan Jumlah Kasus Narkoba

Data dari Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kabupaten Kebumen, untuk kasus narkoba pada tahun 2016 mengalami



peningkatan sebesar 15,38% dari 13 kasus meningkat menjadi 15 kasus.

c. Penurunan Jumlah Konflik Keagamaan

Pada tahun 2016 Kabupaten Kebumen tidak mengalami konflik keagamaan, dibanding dengan tahun sebelumnya juga tidak ada konflik keagamaan, sehingga tidak ada peningkatan atau penurunan, akan tetapi capaiannya sudah sesuai dengan target 100% dengan jumlah konflik keagamaan 0.

Dari tiga indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus pelanggaran norma-norma keagamaan nilai rata-rata hanya menurun sebesar 6% dari target yang telah ditetapkan 25,04%, hal ini dikarenakan masih banyaknya jumlah penderita HIV AIDS dan jumlah kasus narkoba di Kabupaten Kebumen, sehingga capaiannya hanya 24,34%.

3.2.2.2. Sasaran kedua yaitu Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum, yang didukung oleh indikator sasaran:

3.2.2.2.1. Penurunan kasus pelanggaran hukum

Target penurunan kasus terhadap pelanggaran hukum tahun 2016 adalah 800 kasus dengan realisasi 800 kasus baik kasus yang dapat diselesaikan melalui melalui pembinaan, teguran maupun pro yustisi atau sidang pelanggaran perda. Sehingga capaian kinerja untuk indikator dimaksud mencapai 100%.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya kasus pelanggaran hukum terhadap peraturan daerah pada wilayah Kabupaten Kebumen setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2015 kasus pelanggaran hukum menurun 24 kasus. Sedangkan untuk tahun 2015 penurunan kasus terhadap pelanggaran hukum adalah 867 kasus, Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan sejumlah 67 kasus pelanggaran perda di wilayah Kabupaten Kebumen pada tahun 2016. Perbandingan penurunan kasus di wilayah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Perbandingan Penurunan Kasus

Indikator	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
-----------	------------	------------	------------



sasaran	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penurunan Kasus pelanggaran hukum	891	891	867	867	800	800

Faktor keberhasilan yang mendorong penurunan kasus pelanggaran terhadap peraturan daerah antara lain :

1. Bertambahnya tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Meningkatnya kemampuan anggota Satuan polisi pamong praja melalui pendidikan dan pelatihan formal dalam bernegosiasi dan menyelesaikan pelanggaran Peraturan daerah dan meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas melalui pembinaan dan pelatihan.
3. Melakukan sosialisasi perda dan penindakan terhadap pelanggar perda untuk meminimalisir munculnya kasus
4. Melakukan koordinasi dengan pelaksana ketentraman dan ketertiban pada tingkat kecamatan
5. Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan lintas instansi
6. Melakukan Rutinitas Patroli wilayah guna meminimalisir pelanggaran kasus.
7. Melakukan penambahan intensitas pembinaan, penertiban dan penyelesaian kasus pelanggaran terhadap peraturan daerah sampai dengan pro yustisi.

Penurunan kasus pelanggaran peraturan daerah selaras dengan bertambahnya jumlah sumber daya manusia dan juga peningkatan kemampuan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan sehingga dalam menegakan Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah serta dalam memelihara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat ditingkatkan melalui program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan melakukan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang dilaksanakan dengan patroli wilayah, pembinaan dan pelatihan anggota satlinmas.



2. Program pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal dengan melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian
3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman yang dilaksanakan dengan pembentukan Kader Siaga Trantib (KST).

Kader Siaga Tarantib (KST) merupakan pelibatan peran serta partisipasi aktif masyarakat dalam wadah kader siaga ketenteraman dan ketertiban guna mewujudkan situasi dan kondisi Kabupaten Kebumen yang aman, tertib dan kondusif dengan sinergitas pengembangan inovasi kadersiaga dalam mendukung pelayanan publik

Capaian kinerja untuk sasaran terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum dengan indikator Penurunan kasus pelanggaran hukum tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Penurunan Kasus Pelanggaran Hukum

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2015	2016		CAPAIA N KINERJA	OPD PENGAMP U
			TARGE T	REALISAS I		
Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Penurunan kasus pelanggaran hukum		800 kasus	800 kasus	100%	SATPOL PP

3.2.3. Misi ketiga yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dengan sasaran :

3.2.3.1. Sasaran pertama yaitu Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10

Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat

INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2016-2021	REALISA SI KINERJA TH 2012	REALISA SI KINERJA TH 2013	REALISA SI KINERJA TH 2014	REALISA SI KINERJA TH 2015	REALISA SI KINERJA TH 2016
1. Pertumbuhan ekonomi	6%	4,88%	4,65%	5,80%	5,83%	6,29%
2. PDRB Per Kapita	25,18 juta	12,81 juta	14,0 juta	15,81 juta	16,98 juta	17,36 juta
3. Rasio/ Indeks Gini	0,21	NA	0,26	0,23	0,24	0,24

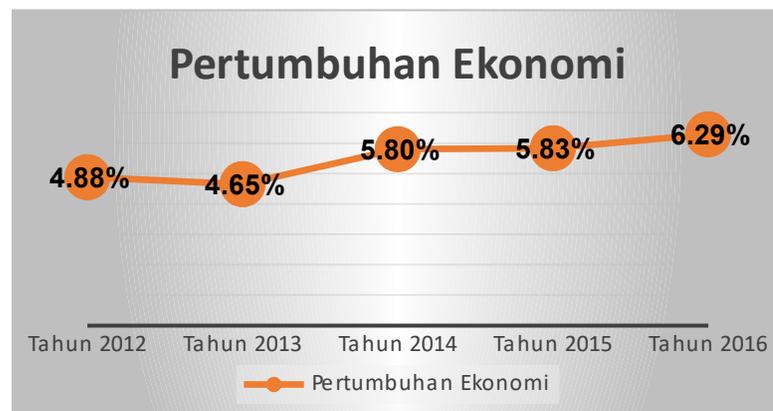
Sumber : Bappeda

Adapun sasaran ini didukung oleh 4 (empat) indikator sasaran yaitu :

3.2.3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi (Atas Dasar Harga Konstan)

Indikator ini ditargetkan sebesar 6% pada akhir Tahun 2016, dengan realisasi kinerja sebesar 6,29% sehingga capaian 104,83%. Hal ini disebabkan perekonomian Kabupaten Kebumen pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen tahun 2016 mencapai 6,29%, tahun 2015 mencapai 5,83%, tahun 2014 mencapai 5,80%, sedangkan tahun 2013 sebesar 4,65%.

Grafik 3.8



Angka pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun sejak tahun 2011-2015. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi pertumbuhan ekonomi di kawasan regional, nasional maupun global. Berbagai kondisi dan shock yang terjadi antara lain adalah krisis ekonomi di Eropa, perubahan kebijakan keuangan nasional AS, penurunan ekonomi di sebagian Asia, serta beberapa kali kebijakan kenaikan harga BBM,



kenaikan tarif dasar listrik, depresiasi rupiah yang kesemuanya menyebabkan sektor riil nasional, regional dan lokal mengalami tekanan. Meskipun demikian, Kabupaten Kebumen justru menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada tahun 2015 dan 2016. Ke depan, perlu dukungan kebijakan Pemerintah Daerah untuk mempertahankan kondisi perekonomian daerah, dengan meningkatkan daya tahan dan daya saing UMKM, mengendalikan inflasi, memperluas peluang dan kesempatan kerja dan berusaha, serta menciptakan iklim berinvestasi yang senantiasa kondusif.

3.2.3.1.2. Pendapatan perkapita penduduk

Apabila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Adapun pendapatan perkapita penduduk sebagai berikut: PDRB per kapita Kebumen Pada tahun 2016 mencapai 17.367.400 rupiah, tahun 2015 mencapai 16.983.670 rupiah, tahun 2014 mencapai 15.810.807 rupiah dengan pertumbuhan sebesar 12,92 %, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 9,34 %. Indikator ini tahun 2016 ditargetkan sebesar 18.349.630 rupiah dan capaian sudah dapat mencapai 94,64%.

Penetapan target pendapatan perkapita penduduk 2016 dalam RPJMD menggunakan tahun dasar 2015 yang juga memenuhi segala asumsi. Asumsi yang digunakan adalah asumsi optimisme mengikuti tren kenaikan PDRB perkapita termasuk asumsi jumlah penduduk sehingga realisasi tidak tercapai.

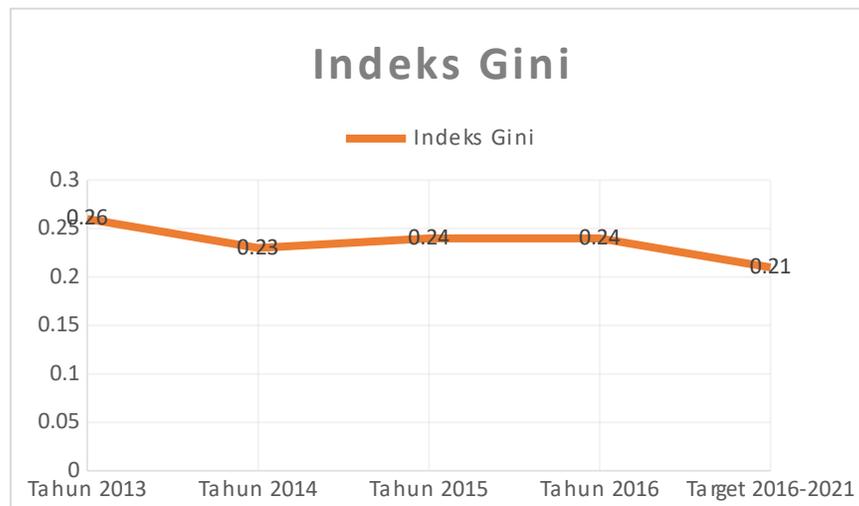
3.2.3.1.3. Rasio/Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Indikator kinerja ke tiga belas yaitu Rasio/Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,23 adapun realisasi 0,241 dengan capaian 95,22%.

Ketimpangan cenderung turun tetapi mengalami peningkatan pada tahun terakhir, walaupun masih masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Kenaikan ini dapat diantisipasi melalui program/kegiatan yang lebih berpihak pada masyarakat berpendapatan rendah (*pro poor*)

Gambar di bawah ini menunjukkan perbandingan Indeks Gini Kabupaten Kebumen dengan kabupaten/ kota di Jawa Tengah



Grafik 3.9

Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan 34 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Sumber: Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

3.2.3.1.4. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi

Pencapaian Indikator Sasaran ini dilaksanakan dengan “Pembentukan Kawasan Perdesaan” yang diukur dengan target 1 Unit atau 1 Kawasan Perdesaan mendapatkan angka capaian kinerja 500% yang tergolong dalam kategori Sangat Berhasil. Berikut ini evaluasi dan analisis indikator kinerja tersebut dengan menggunakan capaian indikator kinerja program:

Tabel 3.11
Capaian Indikator kinerja

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun	Tahun 2016	Target RPJMD



		2015	Target	Realisasi	Capaian	2016-2021
1.	Pembentukan kawasan perdesaan	0% (belum ditargetkan)	1 Unit	5 Kawasan	500%	6 lokasi

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka sebagai implementasinya antara lain Terbentuknya kawasan perdesaan. Sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan yang merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

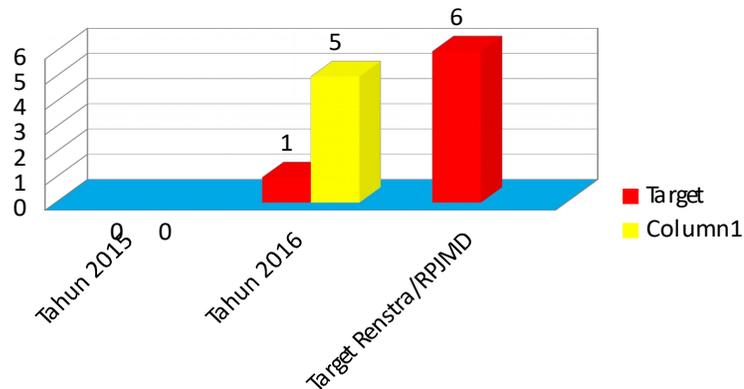
Adapun tujuan pembentukan kawasan perdesaan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan, dengan target pada periode Renstra 2016-2021 sebanyak 6 kawasan.

Capaian kinerja program tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Kebumen nomor : 410/178/KEP/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kebumen berbasis potensi sumberdaya wilayah, antara lain kawasan desa wisata, kawasan anyaman pandan, kawasan gula semut, kawasan batik dan kawasan peternakan sapi terpadu (5 kawasan), sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar atau berdasarkan skala ordinal termasuk sangat berhasil.

- a. Kawasan wisata sudah mendapatkan bantuan kapal tangkap ikan dari Kemendes beserta peralatannya.
- b. Kawasan Gula Semut sudah mendapatkan bantuan pembangunan pasar kawasan di Desa Jladri Kecamatan Buayan dan bantuan peralatan pembuatan Gula Semut dan Sriping Pisang.
- c. Kawasan Peternakan Sapi Ternak Terpadu mendapatkan bantuan dari Program Desa Berdikari dari BAPERMADES sebesar Rp. 100.000.000,00 di Desa Setiadi Kec Puring untuk pengembangan Sumber Daya Manusia dalam berternak sapi

- d. Kawasan Anyaman Pandan Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar Mendapatkan Bantuan dari Program Desa Berdikari dari BAPERMADES sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk mendukung pemasaran Anyaman Pandan di lokasi wisata.

Grafik 3.10
Pembentukan Kawasan Perdesaan



- 3.2.3.2. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya daya saing investasi daerah
Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN

Tabel 3.12
Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGE	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	OPD PENGAMPU
			T KINERJA			
1	Meningktanya daya saing investasi daerah	1 Presentasi peningkatan investasi PMA/PMDN	0	20,26%	125,42%	DPM-PTSP

Analisa capaian kinerja :

- Berdasarkan RPJMD tahun 2016 yang dijadikan dasar menjadi Perjanjian Kinerja Bupati target sasaran meningkatnya daya saing investasi daerah adalah 0 %, angka tersebut menunjukkan target 2016 sama denga target 2015 sehingga tidak ada peningkatan investasi daerah PMA/PMDM. Realisasi peningkatan daya saing Investasi Daerah pada tahun 2015 adalah Rp. 324.430.000.000,00 sehingga



Target investasi Daerah pada Tahun 2016 sama dengan realisasi 2015.

2. Realisasi investasi daerah pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya. Investasi Daerah meningkat sebesar Rp 82.470.000.000 atau 20,26% dari jumlah total investasi daerah tahun 2016.
3. Capaian indikator Meningkatnya daya saing investasi Kabupaten Kebumen sebesar Rp 406.900.000.000,00 atau meningkat 125,42%. Nilai ini adalah perbandingan realisasi nilai investasi daerah tahun 2016 dengan target yang ditentukan sebesar 0% dari peningkatan Tahun 2015.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah :
 - a. Keikutsertaan Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan pameran investasi baik di Propinsi Jawa Tengah maupun di luar Propinsi Jawa Tengah.
 - b. Adanya buklet tentang pemetaan wilayah potensi investasi yang ada di Kabupaten Kebumen.
 - c. Pendataan kepada para pengusaha tentang kegiatan penanaman modal yang ada di Kabupaten Kebumen.
 - d. Adanya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE)
 - e. Sistem pelayanan perijinan online 3 jam (SIPERI)

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan pencapaian sasaran tersebut adalah :

- a. Unsur yang dinilai pada tahun 2015 menggunakan indeks Kepuasan Masyarakat questioner sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PERMENPAN_RB).
- b. Unsur yang dinilai pada tahun 2016 menggunakan acuan form Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Permempan –RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- 3.2.3.3. Sasaran ketiga yaitu Meningkatnya kunjungan wisatawan. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Persentase peningkatan kunjungan wisata

Sasaran ini didukung oleh indikator sasaran yaitu prosentase peningkatan kunjungan wisata dengan target 16,80% dengan realisasi 27,97% sehingga capaian kinerjanya 166,48%.

Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2016 terhadap obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah tercatat 1.096.652 orang dari 9 (sembilan) obyek wisata dan sebanyak 332.965 orang dari 4 (empat) obyek wisata yang dikelola desa/swasta. Pengunjung mengalami kenaikan sejumlah 1.429.617 orang atau mencapai 27,97% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\text{Pengunjung tahun ini} - \text{pengunjung tahun lalu}}{\text{Pengunjung tahun lalu}} \right) \times 100\% \\ & \left(\frac{1.429.617 \text{ orang} - 1.117.136 \text{ orang}}{1.117.136 \text{ orang}} \right) \times 100\% = 27,97\% \end{aligned}$$

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kinerja di tahun 2016 cukup baik, hal ini ditopang dari tingkat kunjungan obyek-obyek wisata yang dikelola oleh desa wisata atau swasta.

Tabel perbandingan kinerja dari tahun-tahun sebelumnya tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan kunjungan wisata

Indikator		Tahun		
		2014	2015	2016
Meningkatnya kunjungan wisata	Target	NA	NA	1.304.815
	Realisasi	957.007	1.117.136	1.429.617

Analisis memposisikan keberhasilan kinerja yang sudah didapat selama tahun 2016 adalah :

- Munculnya obyek-obyek wisata baru di Kabupaten Kebumen sehingga jumlah wisatawan yang datang ke Kebumen semakin meningkat
- Adanya dukungan alternative dari kabupaten Kebumen untuk selalu mensupport tumbuhnya ekonomi masyarakat berbasis pariwisata terus dilakukan yakni dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi desa-desa wisata/destinasi wisata baru lainnya
- Selain itu jumlah kunjungan dari sektor pariwisata meningkat tidak terlepas pada event atau hari tertentu diantaranya event Idul Fitri, Idul



adha, liburan sekolah dan libur tahun baru. Semua rangkaian event/liburan tersebut pemerintah Kabupaten Kebumen telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjangkau pengunjung datang di obyek wisata dengan bantuan dari lintas sektor terkait.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat kunjungan pada sektor pariwisata melalui peningkatan sarana prasarana fasilitas obyek wisata salah satunya antara lain telah dibukanya e- ticketing di pantai suwukgoa jatijajar dan pantai petanahan sehingga pendapatan dari obyek wisata lebih terpantau, dan juga pengembangan aset pariwisata, dan melanjutkan kerjasama /kemitraan pemasaran pariwisata dengan stakeholder terkait.

Program/kegiatan yang ada, sudah sangat menunjang dari keberhasilan pencapaian indikator, program yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu program peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata, melaksanakan promosi pariwisata, program pengembangan destinasi pariwisata, dengan upaya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana obyek wisata, program pemasaran wisata nusantara didalam dan diluar negeri. memaksimalkan pemasaran pariwisata sebagai bentuk akses informasi meliputi pembangunan obyek wisata, travel dialog, farm tour, penyebaran brosur serta mengikuti pameran.

- 3.2.3.4. Sasaran keempat yaitu meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah

Tabel 3.14

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
10	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	52,68%	74,54 %	141,49%

Untuk perhitungan indikator ini menggunakan penjumlahan indikator pendukung yaitu (Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik) + (Luas



irigasi kabupaten dalam kondisi baik) + (Rumah tangga pengguna air bersih) + (Jaringan rumah tangga berlistrik) dibagi 4 dengan pencapaian indikator :

a. Ketersediaan jaringan jalan dalam kondisi yang baik

Ketersediaan jaringan jalan di Kabupaten Kebumen ditargetkan 975,15 kilometer dapat terlampaui dengan realisasi 494,32 kilometer, atau capaian sebesar 50,69%.

keberhasilan indikator ini didukung oleh ketersediaan anggaran baik APBD / BANPROV maupun APBN(DAK) dan kejelasan pembagian kewenangan pembangunan jalan hanya untuk jalan kabupaten (Jalan K1) sementara untuk jalan desa menjadi kewenangan desa

- Dibandingkan realisasi tahun sebelumnya lebih tinggi disebabkan karena apa ketersediaan anggaran baik APBD / BANPROV maupun APBN (DAK) dan kejelasan pembagian kewenangan pembangunan jalan hanya untuk jalan kabupaten (Jalan K1).

Tabel 3.15
Ketersediaan Jalan Sesuai Kondisi Di Kabupaten
Kebumen Tahun 2011-2015 (dalam kilometer)

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RPJMD 2011-2016	REALISASI KINERJA TH 2011	REALISASI KINERJA TH 2012	REALISASI KINERJA TH 2013	REALISASI KINERJA TH 2014	REALISASI KINERJA TH 2015	REALISASI KINERJA TH 2016
KONDISI JALAN							
a. BAIK	458,64	418,594	454,685	473,03	494,44	447,82	590,56
b. SEDANG	-	96,110	91,944	132,92	140,22	199,61	89,72
c. RUSAK RINGAN	-	83,471	58,641	182,63	156,96	150,21	126,57



d. RUSAK BERAT	-	17,025	9,930	169,50	166,95	176,69	168,31
----------------	---	--------	-------	--------	--------	--------	--------

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

Tabel 3.16

Ketersediaan Jalan Sesuai Status Di Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2015 (Dalam Kilometer)

INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA TH 2011	REALISASI KINERJA TH 2012	REALISASI KINERJA TH 2013	REALISASI KINERJA TH 2014	REALISASI KINERJA TH 2015	REALISASI KINERJA TH 2016
STATUS JALAN						
a. Jalan Nasional	60,581	60,582	60,582	49,974	54,19	54,19
b. Jalan Provinsi	30,090	30,090	30,090	30,090	30,09	30,09
c. Jalan Kabupaten	615,200	615,200	615,200	958,07	958,08	958,08
d. Jalan Desa	Na	1.592,08 0	1.592,08 0	1.254,01	1254,01	1254,01

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan

b. Ketersediaan jaringan Irigasi

Indikator ini ditargetkan 12,260 kilometer dapat terealisasi 8,821 kilometer, atau capaian kinerja sebesar 70,31 %.

keberhasilan indikator ini didukung oleh ketersediaan anggaran baik APBD / BANPROV maupun APBN(DAK) dan kejelasan pembagian kewenangan pembangunan infrastruktur irigasi hanya untuk irigasi kewenangan kabupaten, sementara untuk irigasi desa menjadi kewenangan Dinas Pertanian

c. Cakupan Air bersih yang digunakan oleh rumah tangga sejumlah 211,077 rumah tangga dengan jumlah seluruh rumah tangga 307,289 rumah tangga atau capaian kinerja sebesar 70,31 %. keberhasilan indikator ini didukung oleh ketersediaan anggaran baik APBD / BANPROV maupun APBN(DAK) indikator lainnya adalah ditemukannya varian sumber air baru baik dari mata air maupun sumber lainnya.



d. Cakupan Jaringan Listrik rumah Tangga indikator cakupan ini di pengaruhi oleh jumlah rumah tangga berlistrik ada 299,502 rumah tangga dan jumlah seluruh rumah tangga berlistrik ada 358,354 rumah tangga, atau capaian kinerja mencapai 83,58 % . keberhasilan indikator ini didukung oleh kesadaran masyarakat atas pentingnya sumber energi listrik untuk kehidupan sehari – hari telah mendorong masyarakat memasang meteran listrik serta adanya kemudahan penurusan dan pemasangan meteran listrik rumah tangga. Pembangunan jaringan listrik baru ke daerah pegunungan sampai ke pelosok wilayah terpencil mendorong animo masyarakat untuk memasang listrik.

3.2.3.5. Sasaran kelima yaitu meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 3.17
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63 %	61,56 %	97,71%

untuk perhitungan indikator ini menggunakan penjumlahan indikator pendukung yaitu (Indeks Kualitas Udara + Indeks Kualitas Air Sungai + Indeks Tutupan Hutan) dibagi 3 dengan pencapaian indikator :

a. Angka Indeks Kualitas udara target 75 % dan terealisasi pada tahun 2016 sebesar 75 % jadi capaian kinerja pada tahun 2016 mencapai 100% untuk angka indeks kualitas udara



- b. Angka Indeks Kualitas air target 51 % dan terealisasi pada tahun 2016 sebesar 51,25 % jadi capaian kinerja pada tahun 2016 mencapai 100,49 % untuk angka indeks kualitas air
- Penetapan target IKLH tahun 2016 sebesar 63% hanya menggunakan 2 parameter yaitu indeks kualitas air dan indeks kualitas udara, sedangkan untuk indeks tutupan lahan/hutan tidak dimasukkan dengan asumsi sudah menjadi kewenangan provinsi (UU 23 Tahun 2014). Dengan menggunakan dua Indikator tersebut, realisasi yang dicapai sangat baik.
- c. Angka Indeks Tutupan Hutan terealisasi pada tahun 2016 sebesar 63,11 % jadi capaian kinerja pada tahun 2016 mencapai 63,11 % untuk angka indeks Tutupan Hutan.

Tabel 3.18

Capaian IKLH Kabupaten Kebumen tahun 2016

Parameter	%Capaian	%Bobot	%Hasil
Indek Kualitas Udara	75,00	30	22,50
Indek Kualitas Air	51,25	30	15,38
Indek Tutupan Lahan/Hutan	59,21	40	23,68
IKLH			61,56

3.2.4. Misi keempat yaitu Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industry, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, dengan 2 (dua) indikator sasaran :

3.2.4.1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat, dengan indikator :

3.2.4.1.1. Angka Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen selama tahun 2011-2015 masih cukup memprihatinkan, meskipun angkanya dari tahun 2011 semakin menurun. Setelah sempat naik dari 22,70% tahun 2010 menjadi 24,06% tahun 2011, angka kemiskinan terus menurun hingga tahun 2015 penduduk miskin Kabupaten Kebumen mencapai 20,44%.

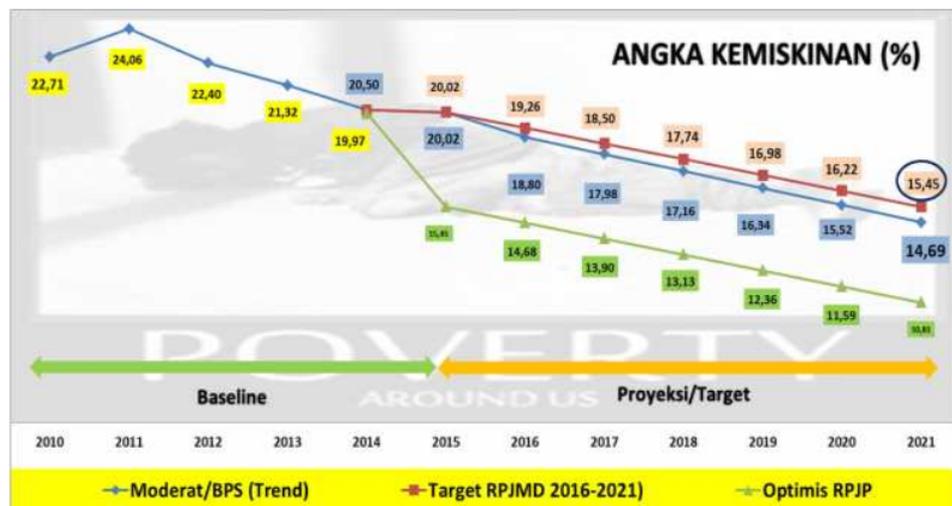
Apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, selama periode 2011-2015, angka kemiskinan Kabupaten Kebumen selalu lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Sedangkan Target angka kemiskinan pada tahun 2016 sebesar 19,26 dengan realisasi belum diketahui karena data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah belum diterbitkan.

Tabel 3.19
Angka Kemiskinan

INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2016-2021	REALISASI KINERJA TH 2012	REALISASI KINERJA TH 2013	REALISASI KINERJA TH 2014	REALISASI KINERJA TH 2015	REALISASI KINERJA TH 2016
Angka Kemiskinan	15,46	20,40	21,32	20,50	20,44	NA

Sumber : Bappeda



Grafik 3.11

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 dan Target Tahun 2016-2021

Sumber: BPS dan Bappeda, 2015

- 3.2.4.2. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya keterserapan tenaga kerja Tahun 2015 dengan jumlah penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 1.184.938 jiwa dengan jumlah penduduk menganggur sebanyak 25.521 jiwa, dengan angka prosentase realisasi sebesar 2,15%. Pada tahun 2016 banyaknya tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan sebesar 3.598 jiwa dibanding dengan pencari kerja terdaftar sebesar 16.044. hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja mendapat angka capaian kinerja sasaran



sebesar 22,43 %. Target penempatan pada tahun 2016 sebesar 3000 jiwa dengan realisasi sebesar 3.598 jiwa.

Tabel 3.20

Keterserapan Tenaga Kerja

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	Angka Pengangguran	2,07 %	22,43 %	108,33 %

Tabel 3.21

hasil pengukuran procentage pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan

No	INDIKATOR Kinerja	Tahun 2015	Tahun 2016		
			Target	realisasi	capaian
1.	Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan	3.321	3.000	3.598	100 %

Realisasi pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan dari tahun 2012 sampai tahun 2016 (data bersifat akumulatif dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebesar 25.702 dan pada tahun 2016 sebesar 3.598 jiwa) tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.22

Realisasi jumlah tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan

Indikator kinerja	Real thn 2012	Real thn 2013	Real thn 2014	Real thn 2015	Real thn 2016
Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan	11.038	17.381	22.381	25.702	29.300

3.2.5. Misi kelima yaitu Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, didukung oleh 2 (dua) sasaran sebagai berikut :



3.2.5.1. Sasaran pertama adalah meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator sasaran yaitu persentase gedung sekolah dalam kondisi baik.

Target di tahun 2016 sebesar 77,40% dan realisasi sebesar 77,24% dan nilai prosentase capaian sebesar 99,80%, dengan catatan karena ada beberapa kegiatan sarana prasarana yang tidak terlaksana dikarenakan sebagian kegiatan sarpras pendidikan menengah dikembalikan kewenangannya kepada Provinsi Jawa Tengah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan sebagian tidak dilaksanakan karena dalam proses peradilan. Rincian persentase jumlah gedung sekolah dalam kondisi baik perjenjang adalah :

- a. Jenjang TK/RA gedung sekolah kondisi baik sejumlah 523 gedung dari total 679 gedung sekolah jenjang TK/RA, dengan persentase capaian sebesar 77,03%.
- b. Jenjang SD/MI gedung sekolah kondisi baik sejumlah 675 gedung dari total 912 gedung sekolah jenjang SD/MI, dengan persentase capaian sebesar 74,01%.
- c. Jenjang SMP/MTs gedung sekolah kondisi baik sejumlah 169 gedung dari total 200 gedung sekolah jenjang SMP/MTs, dengan persentase capaian sebesar 84,50%.
- d. Jenjang SMA/MA/SMK gedung sekolah kondisi baik sejumlah 106 gedung dari total 116 gedung sekolah jenjang SMA/MA/SMK, dengan persentase capaian sebesar 91,38%.

Tabel 3.23

Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan

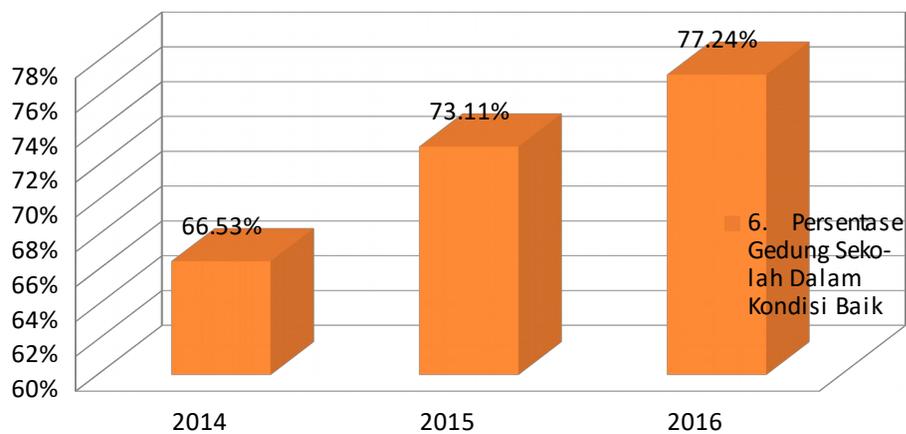
INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2016-2021	REALISA SI KINERJA TH 2012	REALISA SI KINERJA TH 2013	REALISA SI KINERJA TH 2014	REALISA SI KINERJA TH 2015	REALISA SI KINERJA TH 2016
1. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	83,87%	70,51%	74,01%	66,53%	73,11%	77,24%

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen

Persentase gedung sekolah dalam kondisi baik meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2014 persentase gedung sekolah

kondisi baik hanya 66,53%, meningkat menjadi 73,11% di tahun 2015 dan pada tahun 2016 mencapai prosentase sebesar 77,24%. Berikut ini adalah gambar grafik realisasi capaian indikator Persentase gedung sekolah dalam kondisi baik.

Grafik 3.12 Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik Tahun 2014 - 2016



Indikator Persentase gedung sekolah dalam kondisi baik dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 meningkat secara signifikan, karena adanya dukungan anggaran dari berbagai sumber baik anggaran yang bersumber dari APBN (DAK), APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah perlunya anggaran untuk melaksanakan survey teknis, verifikasi dan validasi data terhadap data rinci sarana dan prasarana sekolah/madrasah sebagai uji teknis terhadap usulan maupun data dasar yang sudah dilaporkan kepada Dinas Dikpora dengan sasaran penilaian teknis terhadap data tersebut dapat menjadi lebih lengkap dan valid secara teknis dalam penilaian tingkat kerusakan ruangan dan bangunan. Sehingga pengelolaan anggaran pada bidang sarana dan prasarana pendidikan dapat lebih tepat sasaran dan efisien dalam penganggaran yang ada.

- 3.2.5.2. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan



Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam kesehatan. Indikator sasaran ini dipengaruhi oleh :

1. Persentase Puskesmas yang tersedia kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan, 27 Puskesmas dari 35 Puskesmas, dengan nilai capaian 77%. Capaian kinerja tidak sesuai dengan target disebabkan oleh persentase Puskesmas yang tersedia kebutuhan obat dan perbekalan obat yang tidak mencapai target. Secara nasional obat yang menjadi indikator kebutuhan obat dan perbekalan obat ada 20 jenis obat, pada tahun 2016 Kabupaten Kebumen hanya mampu bisa memenuhi 16 jenis obat, 4 jenis obat yang secara nasional harus ada tetapi Dinas Kesehatan tidak dapat mengadakan. Adapun yang menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan adalah faktor ketersediaan obat, karena pengadaan obat dipasaran harus impor terlebih dahulu.

Upaya yang dilakukan agar dapat memenuhi target antara lain:

- a. Membagi anggaran kas di awal, sehingga pada awal tahun dapat langsung dilaksanakan pengadaan obat dan perbekalan obat sebagai antisipasi pengadaan obat impor.
- b. Koordinasi pejabat pengadaan Dinas Kesehatan dengan Puskesmas

2. Persentase Puskesmas yang dapat melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan (UGD) 100%.

3. Persentase jumlah sarana kesehatan yang sudah menerapkan sistem manajemen kesehatan 100%.

Tahun 2016 target indikator Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan sebesar 95% dan realisasi tahun 2016 sebesar 92,33% atau capaian kinerja 97,18%.

Tabel 3.24

Capaian Kinerja Tingkat akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	95,00%	92,33%	97,18%



Walaupun indikator sasaran Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan tidak mencapai target, dalam pelaksanaannya dilapangan tidak terjadi permasalahan pelayanan kesehatan karena obat-obat yang secara nasional menjadi indikator kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dapat diganti/ substitusi dengan obat yang lain, misalnya Oktitosin sebagai pengganti Generik.

3.2.6. Misi keenam yaitu Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*good and clean government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan public, system kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, professional, transparan dan akuntabel yang didukung dengan system pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama, dengan didukung oleh 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

3.2.6.1. Sasaran pertama yaitu Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah, didukung oleh 3 (tiga) indikator sasaran sebagai berikut :

3.2.6.1.1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang didukung sub indikator - penyusunan Laporan LKPJ, LPPD, AMJ, memori dengan capaian 100%, selengkapnya dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.25
Nilai EKPPD

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian
			Target	Realisasi	
1.	Nilai EKPPD	>3	nilai Sangat Tinggi >3	nilai Sangat Tinggi >3	100%
	penyusunan Laporan - LKPJ - LPPD, - AMJ, - memori	4 dok 150 dok 100 dok 50 dok (copy)	4 dok 150 dok 100 dok 50 dok (copy)	4 dok 150 dok 100 dok 50 dok (copy)	100%
Capaian pada indikator ini					Sangat Baik



Berdasarkan hasil rapat koordinasi di Pemprov Jawa Tengah pada tanggal 02 s.d. 04 Maret 2017 telah diumumkan bahwa Pemkab Kebumen mendapat nilai EKPPD sebesar 3,1 (predikat sangat tinggi) sedangkan untuk pengumuman resmi menunggu Surat Keputusan Mendagri pada hari Otonomi Daerah tanggal 25 April 2017.

3.2.6.1.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Kebumen ditargetkan nilai B terealisasi CC. Penilaian SAKIP Kabupaten Kebumen dilakukan oleh Kementerian PANRB, komponen yang dinilai meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, pencapaian serta evaluasi. Nilai SAKIP Kabupaten Kebumen tahun 2016 adalah CC (54,35) belum bisa mencapai target B (60,00) atau capaian 90,56 %. Apabila dibandingkan tahun 2015 maka hasil penilaian dari lima komponen, empat komponen mengalami peningkatan yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja, sementara satu komponen mengalami penurunan yaitu capaian kinerja. Hal ini terkait dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen yang disumbangkan dari kinerja dimasing-masing SKPD pada tahun 2016 mengalami penurunan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP adalah :

- a. Berkonsultasi kepada Kementerian PANRB untuk mendapatkan penjelasan terkait Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kebumen serta rekomendasi yang tertuang dalam dokumen Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
- b. Melaksanakan rekomendasi atas LHE.
- c. Memantapkan penerapan e-SAKIP, melalui mengubah tampilan system sesuai dengan SOTK yang baru; pembekalan kepada pejabat perencana OPD; melakukan input data kinerja melalui Si Japra, serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap pengukuran kinerja OPD.
- d. Menyusun draft peta kinerja Kabupaten.

Tabel 3.26

Perbandingan nilai SAKIP Kabupaten Kebumen

TINGKAT AKUNTABILITAS	2012	2013	2014	2015	2016
Kategori	CC	CC	CC	CC	CC
Nilai Hasil Evaluasi	50,53	50,92	51,53	51,62	54,35

3.2.6.1.3. Opini BPK atas LKPD

Sasaran ini didukung dengan indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Target kinerja yang ingin dicapai adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Untuk target tahun 2016 indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas LKPD 2015 terealisasi 100% yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD 2015 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Sedangkan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah tahun 2016 sampai dengan saat ini belum bisa dilaporkan karena dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang secara normatif penilaian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan akan disampaikan kurang lebih pada Bulan April atau Mei Tahun 2017.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya perolehan pada tahun 2016 opini WTP atas LKPD Tahun 2015 mengalami peningkatan. Penyebab keberhasilannya yaitu adanya peningkatan kualitas penyajian pelaporan keuangan khususnya aset sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan data aset dianggap sudah memadai. Program pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota dan program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah menjadi program yang menunjang keberhasilan kinerja atas indikator perolehan opini BPK

Perolehan opini dari BPK atas LKPD dari tahun-tahun sebelumnya dan capaian kinerja tahun 2016 dituangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.27

Perbandingan Opini BPK atas LKPD

Indikator Sasaran	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Opini BPK	WTP atas LKPD 2011	WTP atas LKPD 2012	WDP atas LKPD 2013	WDP atas LKPD 2014	WTP atas LKPD 2015	Dalam proses audit

Tabel 3.28

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2015	2016		CAPAIAN KINERJA	OPD PENGAMPU
			TARGET	REALISASI		
Meningkatnya	Opini BPK	WDP	WTP	WTP atas	100%	BPKAD



kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	atas LKPD	atas LKPD 2014	atas LKPD 2015	LKPD 2015		
---	-----------	----------------	----------------	-----------	--	--

3.2.6.2. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah didukung oleh indikator sasaran yaitu Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016

Tabel 3.29
Kelembagaan BAZ

NO	JENIS KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PROSENTAS E
1.	Kebumen Sadar Zakat			
	a. Sosialisasi Desa (Program dan mandiri)	100 Desa	103 Desa	103 %
	b. Sosialisasi bagi SKPD/Kantor/Dinas Sekolah yang belum optimal	5 lokasi	4 lokasi	80 %
2.	Kebumen Taqwa			
	a. Bantuan TPQ Desa Terpencil	4 Desa	9 Desa	225 %
	b. Pengajian dan Santunan Anak Yatim/Piatu dari 26 Kecamatan	130 Anak	840 Anak	646 %
	c. Pentashorufan Sabilillah di 26 Kecamatan	2.000 Orang	1.905 Orang	95 %
	d. Pentashorufan Muallaf di 26 Kecamatan	200 Orang	28 Orang	14 %
3.	Kebumen Cerdas			
	a. Beasiswa anak miskin Tingkat SLTA/Perguruan Tinggi	75 Orang	129 Orang	172 %
	b. Sarana Penunjang Sekolah anak SD/MIN	1.000 Siswa	1.023 Siswa	102%
4.	Kebumen Sehat			
	a. Bantuan Pengobatan Kesehatan	50 Orang	51 Orang	102 %
	b. Bantuan Alat Kesehatan	400 Orang	615 Orang	154 %
	c. Pelayanan Ambulance masyarakat kurang mampu	100 Orang	81 Orang	81 %
5.	Kebumen Peduli			



NO	JENIS KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PROSENTAS E
	a. Pentashorufan Fakir Miskin	2000 Orang	1.631 Orang	82 %
	b. Pentashorufan Bedah Rumah (Program dan Bencana alam)	50 KK	34 KK	68 %
	c. Pentashorufan Bantuan Bencana Alam.		2 Lokasi	200 %
	d. Pentashorufan Ibnu Sabil	100 Orang	42 Orang	42 %
	e. Pentashorufan Ghorim	10 Orang	8 Orang	80 %
6.	Kebumen Makmur			
	a. Bantuan Permodalan Usaha Mikro	127 Orang	114 Orang	90 %

b. Perbandingan antara realisasi, kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan Tahun 2015

Tabel 3.30
Perbandingan realisasi BAZ

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN		Naik/Turun (%)
		2015	2016	
1.	Kebumen Sadar Zakat			
	a. Sosialisasi Desa (Program dan mandiri)	52	103	98%
	b. Sosialisasi bagi SKPD/Kantor/Dinas Sekolah yang belum optimal	0	4	400%
2.	Kebumen Taqwa			
	a. Bantuan TPQ Desa Terpencil	2	9	350%
	b. Pengajian dan Santunan Anak Yatim/Piatu dari 26 Kecamatan	104	840	708%
	c. Pentashorufan Sabilillah di 26 Kecamatan	1.460	1.905	30%
	d. Pentashorufan Muallaf di 26 Kecamatan	36	28	-22%
3.	Kebumen Cerdas			
	a. Beasiswa anak miskin Tingkat SLTA/Perguruan Tinggi	61	129	111%
	b. Sarana Penunjang Sekolah anak SD/MIN	639	1.023	60%
4.	Kebumen Sehat			
	a. Bantuan Pengobatan Kesehatan	20	51	155%
	b. Bantuan Alat Kesehatan	532	615	16%
	c. Pelayanan Ambulance masyarakat kurang mampu	49	81	65%
5.	Kebumen Peduli			
	a. Pentashorufan Fakir Miskin	1.140	1.631	43%
	b. Pentashorufan Bedah Rumah (Program dan Bencana alam)	48	34	-29%
	c. Pentashorufan Bantuan Bencana Alam.	3	2	-33%



	d. Pentashorufan Ibnu Sabil	36	42	17%
	e. Pentashorufan Ghorim	2	8	300%
6.	Kebumen Makmur			
	a. Bantuan Permodalan Usaha Mikro	47	114	143%

Dari Target pendapatan Zakat, Infaq, Amil, Dana bergulir dan Non ZIS sebesar Rp 4.000.000.000,00, realisasi sebesar Rp 4.481.139.767,67 sehingga terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp 481.139.767,67 capaian sebesar 112,03%

Tabel 3.31
Persentase PNS dan Pegawai BUMD
yang menyalurkan zakatnya melalui kelembagaan BAZ

INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2016-2021	REALISA SI KINERJA TH 2012	REALISA SI KINERJA TH 2013	REALISA SI KINERJA TH 2014	REALISA SI KINERJA TH 2015	REALISA SI KINERJA TH 2016
Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui kelembagaan BAZ	80%	30%	44,81%

Sumber : Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen Tahun 2017

Penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- a. Penyebab keberhasilan untuk sistem pemberdayaan ekonomi dikarenakan adanya sistem kelembagaan kelompok infaq bergulir, untuk kegiatan lain dikarenakan karena permintaan dari masyarakat miskin meningkat.
- b. Penyebab penurunan pentashorufan muallaf menurun diakrenakan data berasal dari KUA (Kantor Urusan Agama) solusi ditingkatkan penyuluhan tentang keagamaan Islam oleh penyuluh Kementerian Agama. Penurunan pencapaian pada pelaksanaan pentashorufan bencana alam tahun 2016 dikarena tergantung adanya bencana



alam dan permintaan, solusi setiap kejadian bencana alam dinas terkait segera koordinasi dengan BAZNAS.

- c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan mengoptimalkan kinerja seluruh pengurus BAZNAS Kabupaten Kebumen baik dari unsur pimpinan dan unsur pelaksana.
- d. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dengan selalu berpedoman dan konsisten/komitmen pada visi, misi, program kerja dan serta rencana kerja tahunan yang telah disusun setiap tahun.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Aspek keuangan sebagai salah satu sumber daya bagi terselenggaranya fungsi pemerintahan dan pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 serta Perubahan APBD tahun anggaran 2016.

Pengembangan secara berkelanjutan baik kualitas maupun kuantitas indikator kinerja dari indikator kinerja masukan (input), keluaran (out put), hasil (out come) sangat diperlukan untuk dapat mengukur keberhasilan maupun kegagalan secara lebih akuntabel. Dan yang tidak kalah penting adalah perlu dibangun dan dikembangkan suatu sistem informasi pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai yang mencakup aspek keuangan maupun aspek non keuangan. Perlu juga disadari bahwa tidak seluruh kegiatan yang direncanakan dapat terakomodasi dalam penyusunan RAPBD maupun dalam penetapan APBD, karena pertimbangan aspek strategis dan pemenuhan aspirasi masyarakat, serta adanya kebutuhan yang mendesak.

Pertanggungjawaban aspek keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen berdasarkan Perubahan APBD tahun anggaran 2016 secara garis besar adalah sebagai berikut :

3.3.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 2.779.114.760.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.606.342.944.967,00 atau 93,78% yang terdiri dari:



Tabel 3.32
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	273.228.579.000	291.149.442.636	106,55 %
2.	DANA PERIMBANGAN	2.504.386.181.00 0	2.312.163.281.33 1	0,92%
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1.500.000.000	3.030.221.000	202%
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.779.114.760.000	2.606.342.944.96 7	93,78%

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 belum dapat melampaui sesuai target yang ditentukan yaitu hanya sebesar 93,78% atau Rp. 2.606.342.944.967,00 dari target sebesar Rp. 2.779.114.760.000,00, atau kurang sekitar Rp. 172.771.815.003,00 dari target. Dibandingkan dengan Tahun 2015 yang realisasinya Rp.2.285.364.998.989,68 maka Tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 14,04 %. Hal ini menunjukkan kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

3.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 sebesar Rp. 291.149.442.636 atau 106,55% dari target sebesar Rp. 273.228.579.000 mengalami peningkatan sebesar 18,76% dibandingkan Tahun 2015 yang realisasinya sebesar Rp. 245.159.255.421 Dengan peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah ini, kontribusi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 sebesar 11,17%.

Tabel 3.33
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016

PENDAPATAN ASLI DAERAH	TAHUN 2016		%	REALISASI TAHUN 2015 (Rp)
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
Pajak daerah	58.432.000.000	62.838.508.061	107,54 %	52.015.233.621



PENDAPATAN ASLI DAERAH	TAHUN 2016		%	REALISASI TAHUN 2015 (Rp)
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
Retribusi daerah	26.535.467.000	25.432.356.619	95,84%	26.897.280.470
Pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan	6.755.948.000	6.895.862.950	102,1%	8.561.009.403
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg sah	181.505.164.00 0	195.982.715.00 6	107,97 %	157.685.731.92 7
jumlah	273.228.579.00 0	291.149.442.63 6	106,55 %	245.159.255.42 1

Sumber Data: Dinas PPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

3.3.1.2 Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016 sebesar Rp. 2.312.163.281.331,00 atau 92,3% dari target sebesar Rp. 2.504.386.181.000,00, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang sebesar Rp. 1.343.315.952.370,00 mengalami peningkatan sebesar 8,88 %. Secara terstruktur Pendapatan Daerah, maka pendapatan transfer ini dominan yaitu sebesar 57,75 %.

Tabel 3.33
Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016

DANA PERIMBAN GAN	TAHUN 2016		%	REALISASI TAHUN 2015 (Rp)
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	40.886.167.000	43.287.944.721.	105,87 %	30.994.004.370
Dana Alokasi Umum	1.256.068.249.0 00	1.256.068.249.0 00	100,00 %	1.146.008.708.0 00
Dana Alokasi Khusus	687.967.321.000	480.415.539.065	69,88%	166.313.240.000
Jumlah	1.984.418.758.0 00	1.779.771.732.7 86	89,69%	1.343.315.952.3 70

Sumber Data: Dinas PPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

3.3.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah



Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016 sebesar Rp. 3.030.221.000,00 atau 202% dari target sebesar Rp. 1.500.000.000,00 mengalami penurunan sebesar 99,5% dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp.737.713.048.850,00. Jika dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah, kontribusi Lain-lain Pendapatan yang Sah mencapai 0,12%.

Tabel 3.34
Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	TAHUN 2016		%
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
Pendapatan Hibah	1.500.000.000	2.678.221.000	178,5%
Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	99.365.806.000	110.771.445.545	111,47%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	318.259.862.000	319.278.348.000	100,3%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	102.341.755.000	102.341.755.000	100%
jumlah	521.467.423.000	535.069.769.545	102,6%

Sumber Data: Dinas PPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

3.3.2 Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 26.14.927.866.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.283.482.367.258 atau 87,32% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.35
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	1.876.788.214.000	1.632.709.694.140	86,99%
	a. Belanja Pegawai	1.406.146.508.000	1.210.242.089.274	86,1%
	b. Belanja Hibah	40.053.906.000	35.289.065.833	88,1%
	c. Belanja Bantuan Sosial	47.941.420.000	43.193.146.690	90,1%
	d. Belanja Barang dan jasa	382.646.380.000	343.985.392.343	89,9%



No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2.	Belanja Langsung	738.139.652.000	650.772.673.118	88,2%
	a. Belanja Modal	735.819.199.000	649.699.637.744	88,3%
	b. Belanja Tak Terduga	2.320.453.000	1.073.035.374	46,2%
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.614.927.866.000	2.283.482.367.258	87,3%

Sumber Data : Dinas PPKAD Kab. Kebumen, 2016

3.3.3 Kinerja Keuangan

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pada tahun 2016 antara lain :

- a. Urusan wajib
 - 1) Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kebumen, telah dialokasikan anggaran Tahun 2016 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.36
Anggaran Dan Realisasi Urusan Pendidikan Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Dari Tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	138.200.066.000	118.476.816.157
2013	372.646.025.000	305.772.415.115
2014	109.624.657.000	88.265.785.576
2015	99.370.057.000	89.011.650.084
2016	76.255.596.000	60.720.039.328

Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen, 2016

- 2) Kesehatan

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen. Program di bidang kesehatan ini mengacu pada terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, serta pelayanan kesehatan rujukan yang dilaksanakan oleh RSUD. Selain itu juga, ditujukan untuk terlaksananya penyelidikan epidemiologi, penanggulangan kejadian luar biasa, dan program promosi kesehatan.

Tabel 3.37
Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	57.927.008.000	47.219.844.881
2013	128.589.721.000	111.727.501.314
2014	195.628.494.000	188.927.909.855
2015	260.247.535.000	217.506.004.190
2016	322.011.964.000	282.144.236.157

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

3) Pekerjaan Umum

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran pada tahun 2016 Urusan Pekerjaan Umum mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 499.615.627.000 Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 448.631.553.677 atau sebesar 89,8%. Dalam pelaksanaannya, Urusan Pekerjaan Umum ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Alokasi anggaran pada urusan pekerjaan umum yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.38
Anggaran dan Realisasi Urusan Pekerjaan Umum Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	121.092.572.000	100.375.826.367
2013	146.560.057.000	138.114.428.272
2014	299.769.877.000	290.703.888.659
2015	282.755.238.000	270.794.327.813
2016	499.615.627.000	448.631.553.677

Sumber data: Dinas PPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

4) Perumahan Rakyat

Alokasi anggaran urusan perumahan Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebanyak Rp. 1.030.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 894.676.717,00.

5) Penataan Ruang

Pada Tanggal 17 Desember 2010 telah diterbitkan Rekomendasi Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Penataan Ruang untuk



Kabupaten Kebumen. Target pada tahun 2011 adalah memperoleh rekomendasi Menteri Pekerjaan Umum. Sedangkan target di tahun 2012 adalah berupaya untuk penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Program Perencanaan Tata Ruang. Adapun alokasi anggaran dan realisasinya dari tahun 2012 sampai dengan 2016, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.39
Anggaran dan Realisasi Urusan Penataan Ruang Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	115.000.000	89.888.850
2013	100.000.000	76.756.480
2014	500.000.000	408.703.529
2015	72.725.000.000	67.211.407.634
2016	450.000.000	362.323.014

Sumber data: Bapeda Kabupaten Kebumen, 2016

Sebagai tambahan target RPJM untuk Urusan Tata Ruang hanya sampai pada penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen dan ini telah ditetapkan pada tahun 2012.

6) Perencanaan Pembangunan

Alokasi anggaran pada urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2012-2016 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.40
Anggaran Dan Realisasi Urusan Perencanaan Pembangunan Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	3.252.702.000	2.884.983.247
2013	4.994.656.000	4.509.378.331
2014	5.588.207.000	4.857.787.519
2015	7.766.405.000	7.075.382.553



Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2016	400.000.000	313.975.464

Sumber data: Bapeda Kabupaten Kebumen, 2016

7) Perhubungan

Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD pada urusan Perhubungan sebagai berikut :

Tabel 3.41
Anggaran dan Realisasi Urusan Perhubungan Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	2.190.358.000	1.883.648.482
2013	3.869.785.000	3.345.298.183
2014	4.397.548.000	4.092.791.467
2015	4.150.426.000	3.942.239.155
2016	6.916.188.000	5.753.707.787

Sumber data: Bapeda Kabupaten Kebumen, 2016

8) Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran Urusan Lingkungan Hidup dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.42
Anggaran dan Realisasi Urusan Lingkungan Hidup Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	3.759.470.000	3.566.711.660
2013	10.768.355.000	10.168.457.363
2014	16.176.511.000	14.928.355.600
2015	9.419.821.000	8.053.922.318
2016	32.022.535.000	26.597.948.577

Sumber data: Bapeda Kabupaten Kebumen, 2016

9) Pertanahan

Alokasi anggaran pada urusan pertanahan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.43



Anggaran dan Realisasi Urusan Pertanahan Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	148.000.000	118.501.650
2013	275.000.000	63.726.300
2014	275.000.000	223.338.267
2015	150.000.000	146.482.776
2016	235.000.000	231.162.977

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

Pada Tahun 2013, kegiatan urusan pertanahan penyerapan yang rendah, dikarenakan atas hak untuk pengurusan tanah masih banyak yang belum jelas sehingga memerlukan penelitian bukti-bukti lebih lanjut dan belum bisa diproses oleh Kantor Pertanahan.

10) Kependudukan dan Catatan Sipil

Alokasi anggaran untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dari tahun 2012 sampai dengan 2016, sebagai berikut:

Tabel 3.44

Anggaran dan Realisasi Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	6.701.899.000	5.387.840.017
2013	4.849.821.000	4.651.643.196
2014	4.638.673.000	3.892.881.145
2015	4.520.155.000	4.222.243.340
2016	5.369.284.000	4.845.864.620

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alokasi anggaran pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.45



Anggaran dan Realisasi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	585.470.000	580.847.123
2013	1.016.986.000	992.131.130
2014	610.427.000	532.366.535
2015	526.043.000	467.243.299
2016	928.090.000	768.747.576

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Alokasi Anggaran Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dari Tahun 2012-2016 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.46

Anggaran dan Realisasi Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	2.842.416.000	2.640.705.629
2013	3.387.236.000	3.337.280.758
2014	4.467.794.000	4.303.980.986
2015	4.793.721.000	4.697.622.012
2016	6.156.411.000	5.565.866.354

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

13) Sosial

Dalam melaksanakan urusan sosial, Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan anggaran urusan sosial pada APBD sebagai berikut.

Tabel 3.47

Anggaran dan Realisasi Urusan Sosial Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016



Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	1.408.800.000	1.295.804.826
2013	1.929.472.000	1.844.741.820
2014	2.681.500.000	2.448.055.223
2015	18.153.283.000	3.296.877.715
2016	5.301.299.000	4.899.536.070

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

Pada Tahun 2015, program yang dilaksanakan yaitu Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma, Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo, dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

14) Ketenagakerjaan

Alokasi anggaran Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2012-Tahun 2016 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.48

Anggaran dan Realisasi Urusan Ketenagakerjaan Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	1.175.108.000	1.093.572.271
2013	1.652.648.000	1.560.728.765
2014	3.352.203.000	3.026.807.580
2015	5.350.940.000	5.125.483.710
2016	8.351.001.000	8.186.374.938

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

Program yang dilaksanakan dari dana APBD Kabupaten antara lain Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



Alokasi anggaran untuk Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sumber dana APBD Kabupaten Kebumen dari tahun 2012-2016, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.49
Anggaran dan Realisasi Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	1.422.657.000	1.356.444.217
2013	3.326.642.000	2.911.864.980
2014	3.448.189.000	3.322.214.849
2015	4.821.583.000	4.613.549.734
2016	4.604.519.000	3.654.539.216

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

16) Penanaman Modal

Alokasi anggaran untuk urusan penanaman modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.50
Anggaran dan Realisasi Urusan Penanaman Modal Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	399.600.000	346.364.417
2013	860.954.000	829.305.078
2014	1.870.355.000	1.811.825.282
2015	1.669.814.000	1.613.037.054
2016	1.778.679.000	1.737.594.763

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

Pada Tahun 2016 Program yang dilaksanakan yaitu Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah; Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal; Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha; Penyelenggaraan pameran; dan Monitoring evaluasi. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan



dalam negeri dengan kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha; dan kegiatan peningkatan pelayanan perizinan;

17) Kebudayaan

Pemerintah Kabupaten Kebumen secara rutin pada tahun 2012-2016 mengalokasikan anggaran pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah guna memfasilitasi grup kesenian dan kebudayaan untuk dapat tampil dalam event-event kesenian dan kebudayaan baik tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 3.51
Anggaran dan Realisasi Urusan Kebudayaan Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	349.000.000	331.093.078
2013	524.942.000	516.936.250
2014	838.500.000	810.207.888
2015	958.500.000	931.397.159
2016	815.500.000	757.501.259

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pelestarian budaya, mengembangkan budaya dan memfasilitasi grup kesenian dan kebudayaan untuk dapat tampil dalam event-event kebudayaan yang diselenggarakan baik tingkat kabupaten maupun tingkat nasional.

Program yang dilaksanakan antara lain Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Program pengelolaan Kekayaan Budaya dijabarkan ke dalam kegiatan Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air. Adapun output untuk kegiatan ini adalah terpeliharanya benda cagar budaya daerah di Kabupaten Kebumen. Sedangkan untuk program



Pengelolaan Keragaman Budaya dijabarkan dalam kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah yang outputnya berupa pembinaan seniman dan seniwati serta terpenuhinya kebutuhan alat seni tradisional. dan kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Kuota Kecamatan) yang outputnya berupa pembinaan kesenian/ kebudayaan daerah.

18) Kepemudaan dan Olah Raga

Alokasikan anggaran untuk Urusan Pemuda dan Olah Raga dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.52
Anggaran dan Realisasi Urusan Kepemudaan dan Olahraga Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	742.875.000	713.789.900
2013	771.220.000	749.396.330
2014	4.151.132.000	3.983.472.293
2015	7.580.053.000	7.330.677.610
2016	18.857.018.000	18.542.361.654

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Alokasi anggaran untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.53
Anggaran dan Realisasi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	4.016.779.000	3.741.640.897
2013	7.278.604.000	5.215.822.303
2014	7.411.574.000	6.274.202.026
2015	11.159.207.000	10.428.006.660
2016	11.856.894.000	10.867.640.333

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016



- 20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Alokasi anggaran urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.54

Anggaran dan Realisasi Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	38.266.419.000	35.039.090.269
2013	47.879.081.000	44.314.534.525
2014	50.259.406.000	38.582.249.058
2015	58.504.032.000	48.849.509.327
2016	63.885.229.000	57.620.233.545

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

Pada tahun 2016 program yang dilaksanakan antara lain Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa; Program pembinaan dan pengembangan aparatur; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah; Program pengembangan wawasan kebangsaan; Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; Program peningkatan disiplin aparatur; Program pembinaan dan pengembangan aparatur; Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; dan Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

- 21) Ketahanan Pangan



Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah sentra produksi dan penyangga beras regional maupun nasional. Selama periode tahun 2012 sampai dengan 2016 ini, Kabupaten Kebumen selalu mampu mempertahankan surplus produksi padi.

Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.55
Anggaran dan Realisasi Urusan Ketahanan Pangan Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	1.413.755.000	1.386.430.649
2013	2.372.672.000	2.352.812.397
2014	2.188.264.000	2.084.936.914
2015	175.946.000	169.446.884
2016	214.190.000	209.709.846

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alokasi Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ini sebagai berikut.

Tabel 3.56
Anggaran dan Realisasi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	1.806.909.000	1.740.250.225
2013	7.682.275.000	6.256.036.666
2014	4.785.003.000	4.600.667.234
2015	4.757.610.000	4.521.070.216
2016	7.387.956.000	6.519.507.600

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

Program yang dilaksanakan pada Tahun 2016, yaitu : Program Pengembangan Data/Informasi; Program Pengembangan Perumahan; Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam



Membangun Desa; Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan; dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

23) Statistik

Alokasi anggaran Urusan Statistik yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016, sebagai berikut:

Tabel 3.57
Anggaran dan Realisasi Urusan Statistik Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	450.311.000	445.989.395
2013	459.661.000	445.062.760
2014	845.776.000	828.475.970
2015	1.018.030.000	998.737.219
2016	1.485.250.000	1.415.059.500

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

24) Kearsipan

Alokasi anggaran urusan Kearsipan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen tahun 2012-2016, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.58
Anggaran dan Realisasi Urusan Kearsipan Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	47.676.000	47.525.895
2013	79.950.000	78.587.017
2014	190.000.000	178.865.215
2015	259.000.000	249.463.269
2016	342.400.000	338.505.783

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

Dengan program yang dilaksanakan adalah Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

25) Komunikasi dan Informatika



Penyelenggaraan urusan ini dilakukan melalui penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan optimalisasi pemanfaatan TIK. Alokasi anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.59
Anggaran dan Realisasi Urusan Komunikasi dan Informatika Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	2.132.513.000	2.056.156.853
2013	3.247.972.000	3.132.802.933
2014	3.545.340.000	3.342.277.153
2015	7.496.867.000	7.216.635.036
2016	7.036.800.000	5.778.058.169

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2015

Adapun program yang dilaksanakan yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi; Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi; dan Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa.

Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah fasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi melalui pengawasan dan pembinaan bidang usaha jasa komunikasi seperti Warung Internet (Warnet), Warung Seluler (Warsel), paket pos dan penyiaran.

26) Perpustakaan

Alokasi anggaran Urusan Perpustakaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016, sebagai berikut:

Tabel 3.60
Anggaran dan Realisasi Urusan Perpustakaan Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	342.000.000	329.046.122
2013	1.762.276.000	1.658.465.762
2014	582.238.000	571.164.961
2015	1.941.178.000	1.905.757.266



Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2016	709.342.000	661.785.834

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

Program yang dilaksanakan yaitu Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

b. Urusan Pilihan
1) Pertanian

Alokasi anggaran Urusan Pertanian yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.61
Anggaran dan Realisasi Urusan Pertanian Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	10.382.624.000	9.415.216.674
2013	6.270.339.000	5.998.971.786
2014	9.863.261.000	9.394.864.591
2015	13.821.841.000	13.436.406.593
2016	19.500.469.000	18.047.020.344

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

Urusan ini dilaksanakan melalui beberapa program yaitu : Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan; Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan; Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan; Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; Program Peningkatan produksi hasil peternakan; Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; dan Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.

2) Kehutanan

Alokasi anggaran dan penyerapan anggaran urusan Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2012-2016, sebagaimana tercantum dalam tabel :

Tabel 3.62
Anggaran dan Realisasi Urusan Kehutanan Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016



Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	2.168.643.000	1.976.497.060
2013	1.992.932.000	1.828.074.665
2014	2.439.464.000	2.162.881.530
2015	3.213.934.000	2.896.258.560
2016	4.517.938.000	3.648.245.051

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2015

Program yang dilaksanakan antara lain Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan Program rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pengembangan hutan tanaman; Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu; Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan; Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan; Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan; dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan.

Upaya perlindungan hutan dan lahan dan pengurangan lahan kritis yang dilaksanakan Kabupaten Kebumen berupa Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan pada daerah aliran sungai. Daerah Aliran Sungai (DAS) mempunyai fungsi sangat strategis dari segi ekologi, hidrologi, dan sosial ekonomi. Oleh karenanya pemerintah wajib melindunginya dari kerusakannya agar DAS dapat tetap berfungsi sebagai penyangga kehidupan melalui konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahannya.

Bentuk rehabilitasi lahan dan konservasi tanah yang dilakukan antara lain dengan pembuatan hutan rakyat, pengkayaan hutan rakyat, penghijauan lingkungan dan pembangunan bangunan sipil teknis (dam penahan dan *gully plug*).

3) Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk urusan energi dan sumber daya mineral dialokasikan anggaran yang bersumber dari APBD

Alokasi anggaran urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2012-2016, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.63

Anggaran dan Realisasi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)



Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	5.160.383.000	5.020.697.755
2014	11.852.684.000	11.440.251.631
2015	18.347.860.000	17.119.733.939
2016	16.099.824.000	13.996.927.417

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

Program yang dilaksanakan antara lain Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; dan Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.

4) Pariwisata

Alokasi anggaran pada tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.64
Anggaran dan Realisasi Urusan Pariwisata Yang Bersumber dari APBD
Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2015

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	4.076.656.000	3.806.657.058
2013	4.718.143.000	4.517.007.711
2014	12.178.215.000	10.919.424.955
2015	9.159.235.000	8.777.046.419
2016	16.543.237.000	15.847.614.928

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

Program yang dilaksanakan antara lain Program pengembangan pemasaran pariwisata; Program Pengembangan Destinasi Wisata; dan Program pengembangan Kemitraan. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan antara lain Kegiatan Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata; Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri; Kegiatan Pengembangan statistik wisata terpadu; Kegiatan Pemeliharaan Hewan di Obyek Wisata; Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

pariwisata; Kegiatan Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha; Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana / fasilitas obyek wisata; Kegiatan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya; Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata; dan Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.

5) Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kebumen memiliki Potensi Kelautan dan Perikanan yang cukup besar sehingga perlu mendapat perhatian dalam upaya pemanfaatan dan pengembangannya. Dalam rangka mengembangkan sektor kelautan dan perikanan dialokasikan dana Alokasi anggaran untuk urusan kelautan dan perikanan tahun 2012-2016, sebagai berikut:

Tabel 3.65
Anggaran dan Realisasi Urusan Kelautan dan Perikanan Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	5.564.338.000	5.496.012.319
2013	6.604.673.000	6.336.273.331
2014	5.026.778.000	4.882.783.025
2015	6.463.440.000	5.173.340.554
2016	7.957.287.000	7.809.971.538

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

Program yang dilaksanakan antara lain Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan; Program Pengembangan Budidaya Perikanan; Program Pengembangan Perikanan Tangkap; dan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Ekonomi Pesisir; Kegiatan Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengaman Sumberdaya Kelautan; Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul; Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan; Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan; Kegiatan



Pengembangan Bibit Ikan Unggul (kuota Kecamatan); Kegiatan Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan; Kegiatan Pengembangan Sarana Alat Tangkap; Kegiatan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran Benih Ikan Unggul.

6) Perdagangan

Urusan perdagangan berperan yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat karena bersifat langsung menunjang proses transaksi pasar.

Guna mengoptimalkan Urusan Perdagangan dalam mendukung perekonomian masyarakat yang bersifat langsung menunjang proses transaksi pasar, maka pada Tahun 2016 dialokasikan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen.

Tabel 3.66
Anggaran dan Realisasi Urusan Perdagangan Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	60.989.444.000	60.384.542.339
2013	20.004.778.000	19.594.156.254
2014	12.429.061.000	12.269.191.814
2015	373.108.314.000	21.989.114.476
2016	26651672000	25705838943

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2015

7) Industri

Alokasi anggaran untuk urusan ini sebagaimana berikut.

Tabel 3.67
Anggaran dan Realisasi Urusan Industri Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	604.000.000	576.904.370
2013	590.000.000	584.904.295
2014	621.585.000	619.589.067
2015	778.435.000	774.591.983
2016	861.100.000	854.136.179

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016



Adapun program yang dilaksanakan tahun 2012-2016 antara lain: Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; kegiatannya meliputi: fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, serta pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi, Program penataan struktur industri, Fasilitas bagi industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri, Pemetaan industri.

8) Ketrasmigrasian

Alokasi anggaran urusan ketrasmigrasian yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.68
Anggaran dan Realisasi Urusan Ketrasmigrasian Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	180.000.000	161.000.000
2013	280.000.000	144.958.100
2014	175.000.000	107.342.760
2015	175.000.000	165.276.080
2016	360.000.000	302.954.313

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2016

Program yang dilaksanakan adalah Program pengembangan wilayah transmigrasi dengan kegiatan Pengarahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan Transmigrasi.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, secara keseluruhan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa sasaran Renstra berjumlah 16 (enam belas) sasaran dan secara keseluruhan rata-rata capaian sasaran sebesar 99,58% dengan kategori sangat baik, dengan rincian yaitu 10 (sepuluh) sasaran mencapai tingkat capaian sebesar 100%, sedangkan 6 (enam) sasaran lainnya berturut-turut dengan capaian sebesar 90,86%, 92,99%, 96%, 96,80%, 103,74% dan 109,67%;
2. Kemudian untuk indikator sasaran berjumlah 57 (lima puluh tujuh) indikator, dengan kategori sangat baik sejumlah 48 (empat puluh delapan) indikator. Sedangkan yang masih dalam kategori baik sejumlah 2 (dua) indikator, kategori cukup baik sejumlah 2 (dua) indikator, kategori kurang sejumlah 1 (satu) indikator dan belum/tidak dilaksanakan sejumlah 4 (empat) indikator sebagai berikut :
 - a. Indikator Meningkatnya pemahaman sosialisasi program olah raga dengan target 75%, realisasi 61,18% sehingga capaian 81,57%;
 - b. Indikator Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum dengan target 5 LKM, realisasi 4 LKM sehingga capaian 80%;
 - c. Indikator Peningkatan kemampuan TP-UKS Kecamatan, dengan target 140 orang, terealisasi 84 orang atau tercapai 60% pada tahun 2016;
 - d. Indikator Jumlah warga peduli AIDS (WPA) yang terbentuk dan memiliki anggaran kegiatan WPA, dengan target 460 SK, terealisasi 304 SK atau tercapai 66,08% pada tahun 2016;
 - e. Indikator Jumlah partisipasi pegawai/ instansi mengikuti lomba, dengan target 87 OPD tercapai 45% pada tahun 2016;
 - f. Indikator Tingkat kepuasan pelayanan transportasi jamaah haji, dengan target 70% sedangkan realisasi belum dilaksanakan survey kepuasan pelayanan pada tahun 2016;
 - g. Indikator Pelaksanaan reformasi birokrasi dengan Nilai baik (B) dengan target nilai Reformasi Birokrasi B akan tetapi pada Tahun 2016 belum dilaksanakan penilaian;
 - h. Indikator terlaksananya sukses pemilu dengan target 70%, akan tetapi tahun 2016 tidak ada pelaksanaan pilkades;

- i. Indikator Terlaksananya pilkades kondusif (yang kondusif dibagi jumlah desa yang melaksanakan pilkades) dengan target 100% sedangkan pada tahun 2016 tidak ada pelaksanaan pilkades.

Terhadap 9 (sembilan) Indikator tersebut di atas telah dilakukan upaya-upaya peningkatan sebagai berikut :

- a. Upaya untuk meningkatkan pemahaman sosialisasi program olah raga yaitu dengan melakukan pre test dan post test sebelum dan pasca sosialisasi, mensosialisasikan ulang pada tahun berikutnya serta mengingatkan kembali melalui Surat Edaran;
- b. Upaya untuk meningkatkan Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum yaitu dengan mendorong dan memberikan pemahaman kepada LKM yang belum berbadan hukum terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sehingga pada tahun berikutnya siap bertransformasi.
- c. Upaya untuk meningkatkan kemampuan TP-UKS Kecamatan yaitu dengan mengadakan sosialisasi kembali/lanjutan terhadap TP-UKS yang diawali dengan pre test dan evaluasi pemahaman dengan post test. Hal ini diharapkan ke depan tingkat pemahaman peserta dapat meningkat sehingga target dapat tercapai;
- d. Upaya untuk meningkatkan Jumlah warga peduli AIDS (WPA) yang terbentuk dan memiliki anggaran kegiatan WPA yaitu dari target 460 desa/kelurahan dan memiliki anggaran kegiatan WPA di desa/Kelurahan, tercapai 304 desa/kelurahan. Sisa 156 desa/kelurahan diselesaikan pada tahun 2017 dan 2018 oleh Desa/Kelurahan yang membentuk.
- e. Upaya untuk meningkatkan jumlah partisipasi pegawai/ instansi mengikuti lomba yaitu dengan membuat Surat Edaran kepada Kepala Perangkat Daerah untuk memberikan partisipasi dalam penyelenggaraan event olahraga pegawai yang dilombakan dalam rangka Hari Olah Raga Nasional, melakukan sosialisasi terkait hal tersebut serta pemberitahuan melalui website, Ratih TV, banner dll. Adapun dalam pemberitahuan disertakan dengan jenis/event olahraga yang dilombakan, jadwal, waktu, tempat pelaksanaan dan dengan kejelasan pemberian hadiah/tropi sebagaimana ketentuan yang ditetapkan sehingga diharapkan dapat meningkatkan semangat peserta lomba;
- f. Upaya untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan transportasi jamaah haji adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta haji baik

pelayanan sebelum ataupun sesudah keberangkatan haji serta dengan menyediakan tempat pengaduan pelayanan untuk menampung saran dan masukan pada tahun yang akan datang;

- g. Upaya untuk pelaksanaan reformasi birokrasi dengan Nilai baik (B) yaitu dengan kerjasama/bantuan Inspektorat untuk melakukan rewiuw dan penilaian atas capaian indikator pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Upaya untuk terlaksananya sukses pemilu yaitu sehubungan dengan pada tahun 2016 tidak ada pilkades maka penyiapan peningkatan intensitas sosialisasi di semua lini dan media pelaksanaan Pilkada serta validasi yang lebih akurat tentang data pemilih baik Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap, maupun akurasi data angka partisipasi akan difokuskan pada Tahun 2017;
- i. Upaya untuk terlaksananya pilkades kondusif yaitu bahwa untuk tahun 2016 tidak ada pelaksanaan Pilkades dikarenakan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pilkades baru ditetapkan pada akhir tahun 2016, sehingga Peraturan Bupati yang mengatur Pilkades belum terbit, ke depan pada tahun 2017 hal-hal yang disiapkan untuk mendukung capaian indikator ini yaitu dengan sosialisasi Perda dan Perbup tentang Pilkades, memberikan fasilitasi saat pelaksanaan pemilihan, monitoring dan evaluasi ke desa yang melaksanakan pilkades serta menyusun Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa.

4.2. REKOMENDASI/SARAN

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya.

Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku. Penyusunan LKjIP ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran dan perbaikan sangat dibutuhkan untuk penyusunan LKjIP yang lebih baik. Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran - saran antara lain :

1. Indikator sasaran pada Penetapan Kinerja maupun Renstra dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas dalam upaya pencapaian target yang lebih berorientasi pada hasil (*outcome*);
2. Target yang ditetapkan bersifat relevan, spesifik, terukur dan benar-benar sesuai dengan tugas pokok fungsi Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Kebumen sehingga diharapkan akan memudahkan dalam upaya merancang berbagai kegiatan yang berorientasi pada hasil (*outcome*);
3. Menerapkan anggaran berbasis kinerja sehingga kegiatan-kegiatan tidak hanya menghasilkan *output* tetapi sekaligus dapat menghasilkan *outcome* dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran;
4. Implementasi Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah melalui *e-Government* (Si-Japra) benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* maupun *outcomes* kegiatan yang bersangkutan; dan
5. Optimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan;
6. Adanya penghargaan bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan kinerja dengan baik dan sanksi bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan kinerja kurang baik; dan
7. Untuk menyusun peta indikator/cascading kinerja dalam rangka penjabaran indicator yang tertuang dalam Renstra Setda kepada para Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Setda Kabupaten Kebumen.

LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah guna mewujudkan *good and clean governance* sehingga akan mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kawasan Rawan Bencana.....	2
Tabel 1.2 Jumlah PNS Menurut Golongan (Non Guru).....	5
Tabel 1.3 Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural.....	5
Tabel 1.4 Jumlah PNS Menurut Pendidikan.....	6
Tabel 1.5 Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan.....	6
Tabel 1.6 Identifikasi Isu Strategis Berdasarkan Permasalahan Hasil Evaluasi Kinerja RPJMD Tahun 2010-2015 21	
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....	29
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2016.....	32
Tabel 3.2 Derajat pendidikan Masyarakat.....	36
Tabel 3.3 Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan.....	38
Tabel 3.4 Prestasi dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.....	40
Tabel 3.5 Angka Harapan Hidup.....	42
Tabel 3.6 Angka Kematian ibu.....	44
Tabel 3.7 Angka Kematian Bayi.....	45
Tabel 3.8 Masyarakat Yang Agamis dan Berakhlak Mulia.....	46
Tabel 3.9 Penurunan Kasus Pelanggaran Hukum 50	
Tabel 3.10 Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat.....	51
Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja.....	54
Tabel 3.12 Penetapan atau Perjanjian Kinerja tahun 2016.....	55
Tabel 3.13 Perbandingan Kunjungan Wisata.....	57
Tabel 3.14 Presentase Tingkat Pelayanan Infrastruktur Wilayah 59	
Tabel 3.15 Ketersediaan Jalan Sesuai Kondisi di Kabupaten Kebumen.....	60
Tabel 3.16 Ketersediaan Jalan Sesuai Status di Kabupaten Kebumen 60	
Tabel 3.17 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	62
Tabel 3.18 Capaian IKLH Kabupaten Kebumen Tahun 2016.....	62
Tabel 3.19 Angka Kemiskinan 63	
Tabel 3.20 Keterserapan Tenaga Kerja 64	

Tabel 3.21 Hasil Pengukuran Prosentase Pencari Kerja yang terdaftar dan Ditempatkan	
	65
Tabel 3.22 Realisasi Jumlah tenaga Kerja Yang terdaftar dan ditempatan.....	65
Tabel 3.23 Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	66
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Tingkat Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	
	68
Tabel 3.25 Niai EKPPD.....	69
Tabel 3.26 Perbandingan Nilai SAKIP Kabupaten Kebumen.....	70
Tabel 3.27 Perbandingan opini BPK atas LKPD.....	71
Tabel 3.28 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah.....	71
Tabel 3.29 Kelembagaan BAZ.....	72
Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi BAZ.....	73
Tabel 3.31 Presentase PNS dan Pegawai BUMD yang Menyalurkan Zakat Melalui Kelembagaan BAZ	
	74
Tabel 3.32 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016	
	76
Tabel 3.33 Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2016	
	77
Tabel 3.34 Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016	
	78
Tabel 3.35 Realisasi Belanja Daerah tahun 2016.....	78
Tabel 3.36 Anggaran dan Realisasi Urusan Pendidikan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2016	
	79
Tabel 3.37 Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan tahun 2012-2016	
	80
Tabel 3.38 Anggaran dan realisasi Urusan Pekerjaan umum yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016	
	80
Tabel 3.39 Anggaran dan Realisasi Urusan Penataan ruang yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016	

81

Tabel 3.40 Anggaran dan Realisasi Urusan Perencanaan Pembangunan yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016..... 82

Tabel 3.41 Anggaran dan Realisasi Urusan Perhubungan yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

82

Tabel 3.42 Anggaran dan Realisasi Urusan Lingkungan Hidup yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

83

Tabel 3.43 Anggaran dan Realisasi Urusan Pertanahan yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

83

Tabel 3.44 Anggaran dan Realisasi Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

84

Tabel 3.45 Anggaran dan Realisasi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

84

Tabel 3.46 Anggaran dan Realisasi Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

85

Tabel 3.47 Anggaran dan Realisasi Urusan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

85

Tabel 3.48 Anggaran dan Realisasi Urusan Ketenagakerjaan yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

86

Tabel 3.49 Anggaran dan Realisasi Urusan Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

86

Tabel 3.50 Anggaran dan Realisasi Urusan Penanaman Modal yang Bersumber
Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

87

Tabel 3.51 Anggaran dan Realisasi Urusan Kebudayaan yang Bersumber Dari
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

88

Tabel 3.52 Anggaran dan Realisasi Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang
Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

89

Tabel 3.53 Anggaran dan Realisasi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun
2012-2016

89

Tabel 3.54 Anggaran dan Realisasi Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian yang Bersumber Dari APBD
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

90

Tabel 3.55 Anggaran dan Realisasi Urusan Ketahanan Pangan yang Bersumber
Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

91

Tabel 3.56 Anggaran dan Realisasi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun
2012-2016

91

Tabel 3.57 Anggaran dan Realisasi Urusan Statistik yang Bersumber Dari APBD
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

91

Tabel 3.58 Anggaran dan Realisasi Urusan Kearsipan yang Bersumber Dari
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

92

Tabel 3.59 Anggaran dan Realisasi Urusan Komunikasi dan Informatika yang
Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

93

Tabel 3.60 Anggaran dan Realisasi Urusan Perpustakaan yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

94

Tabel 3.61 Anggaran dan Realisasi Urusan Pertanian yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

94

Tabel 3.62 Anggaran dan Realisasi Urusan Kehutanan yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

95

Tabel 3.63 Anggaran dan Realisasi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016 96

Tabel 3.64 Anggaran dan Realisasi Urusan Pariwisata yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

97

Tabel 3.65 Anggaran dan Realisasi Urusan Kelautan dan Perikanan yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

98

Tabel 3.66 Anggaran dan Realisasi Urusan Perdagangan yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

99

Tabel 3.67 Anggaran dan Realisasi Urusan Industri yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

99

Tabel 3.68 Anggaran dan Realisasi Urusan Ketransmigrasian yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

100

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.....	37
Grafik 3.2 Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan.....	39
Grafik 3.3 Capaian Prestasi Pemuda dan Olah Raga Tahun 2012 -2016.....	41
Grafik 3.4 Perbandingan Angka Harapan Hidup.....	42
Grafik 3.5 Perbandingan Angka Kematian Ibu.....	43
Grafik 3.6 Perbandingan Angka Kematian Bayi.....	45
Grafik 3.7 Angka Melek Huruf Al-Quran Siswa Lulus Sekolah.....	47
Grafik 3.8 Pertumbuhan Ekonomi.....	51
Grafik 3.9 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Kebumen.....	53
Grafik 3.10 Pembentukan Kawasan Perdesaan.....	55
Grafik 3.11 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 dan Target Tahun 2016-2021.....	64
Grafik 3.12 Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik Tahun 2014 - 2016.....	67

DAFTAR PENGHARGAAN

1. Penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2015 dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia tanggal 5 Desember 2016
2. Juara III Lomba Carnival Tingkat Provinsi Jateng
3. Juara II Lomba Raskin Award Tingkat Provinsi Jateng untuk Kategori Kabupaten
4. Juara II Lomba Raskin Award Tingkat Provinsi Jateng untuk Kategori Desa/ Kelurahan
5. Juara II Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Propinsi Jawa Tengah oleh Desa Jogosimo Kecamatan Klirong.
6. Juara Harapan III Lomba Desa Tingkat Propinsi Jawa tengah oleh Desa Giwangretno Kecamatan Sruweng
7. Penghargaan dari Presiden RI DANA RAKCA 2016 Untuk Daerah Berkinerja baik pengelolaan keuangan daerah pelayanan dasar publik- ekonomi-dan kesejahteraan Kabupaten Kebumen
8. Juara I Tingkat Nasional Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Peternak Sapi a.n KTT Tunas Mandiri Desa Sitiadi Kec. Puring
9. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Nasional Tahun 2016 diberikan kepada Kelompok Tani Ternak Tunas Mandiri Desa Sitiadi Kec. Puring
10. Peringkat II Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2016 Tingkat Provinsi Kategori Pembina Ketahanan Pangan (Aparat Pemerintahan Desa) diberikan kepada Kepala Desa Karangduwur Kec. Ayah
11. Peringkat II Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2016 Kategori Pelaku Ketahanan Pangan (kelompok Produksi Pangan) diberikan kepada Kelompok Tani Mekarjaya Desa Bendungan Kec. Kuwarasan
12. Peringkat III Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi Kategori Pelaku ketahanan Pangan (Kelompok Produksi Pangan) Diberikan kepada Kelompok Tani Ternak Rukun Maju Makmur Desa Sitiadi kec. Puring
13. Peringkat III Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi Kategori Pelaku ketahanan Pangan (UPKT "Sun Coco" Desa Petanahan Kec. Petanahan
14. Juara III Lomba Cipta Menu Tk. Provinsi Jawa Tengah
15. Penghargaan atas Prestasi dalam mendorong percepatan penerbitan Ijin Usaha Mikro dan Kecil dari KeMenKopUMKM RI
16. SD Negeri 1 Karangduwur, Petanahan
17. Juara II Lomba Budaya Mutu Tingkat Nasional
18. Juara II Lomba LKD Tingkat Provinsi Jawa Tengah
19. Juara III Lomba Perpustakaan desa Tingkat Provinsi Jawa Tengah
20. Piagam Penghargaan Inagara sebagai Daerah Berkomitmen Tinggi terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Laboratorium Inovasi Administrasi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI

KABUPATEN : KEBUMEN

TAHUN ANGGARAN : 2016

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	12,38 tahun	12,38 tahun
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	6,98 tahun	6,98 tahun
2.	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	54,74 %	54,74 %
3.	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	44,23 %	44,23 %
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	72,81 tahun	72,81 tahun
		6. Angka Kematian Ibu	100	100
		7. Angka Kematian Bayi	11,00	11,00
5.	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	100 %	100 %
		9. Cakupan Penanganan KasusKasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	25,04 %	25,04 %
6.	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Penurunan kasus pelanggaran hukum	800 kasus	800 kasus
7.	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbuhan ekonomi	5,86 %	5,86 %
		12. Pendapatan perkapita penduduk	Rp. 18.349.630	Rp. 18.349.630
		13. Rasio/Indeks Gini	0,23	0,23
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	1 unit	1 unit
8.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	0 %	0 %
9.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	16,80 %	16,80 %
10.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	52,68 %	52,68 %
11.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,00	63,00
12.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	19,26 %	19,26 %
13.	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	2,07 %	2,07 %
14.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	77,40 %	77,40 %
15.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	95,00 %	95,00 %

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA
-----	---------	-------------------	----------------	----------------

			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
16.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	B	B
		24. Nilai akuntabilitas kinerja	B	B
		25. Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP
17.	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	40,00 %	40,00 %